

**PERSEPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI PPK_n UNIVERSITAS
LAMPUNG TERHADAP KAMPANYE PEMILUKADA
SERENTAK DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2015**

(Skripsi)

Oleh

RIO AFANDI



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

PERSEPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI PPKn UNIVERSITAS LAMPUNG TERHADAP KAMPANYE PEMILUKADA SERENTAK DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

Oleh

RIO AFANDI

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis persepsi mahasiswa program studi PPKn Universitas Lampung terhadap kampanye pemilukada serentak di Provinsi Lampung tahun 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 329 orang dengan sampel 30 orang. Teknik pokok pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket, kemudian untuk menganalisis data menggunakan rumus *Interval* dan *Persentase*.

Hasil penelitian menunjukkan persepsi mahasiswa program studi PPKn Universitas Lampung terhadap kampanye PEMILUKADA serentak di Provinsi Lampung adalah menyatakan kurang baik, karena banyak tidak mengikuti aturan dan fokus dalam melakukan kampanye. Fokus dalam melakukan kampanye yaitu dalam materi, media, tempat dan waktu, subjek serta sasaran kampanye.

Kata Kunci: kampanye, pemilukada serentak, persepsi mahasiswa

**PERSEPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI PPK_n UNIVERSITAS
LAMPUNG TERHADAP KAMPANYE PEMILUKADA
SERENTAK DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2015**

Oleh

Rio Afandi

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **PERSEPSI MAHASISWA PROGRAM
STUDI PPKn UNIVERSITAS LAMPUNG
TERHADAP KAMPANYE PEMILUKADA
SERENTAK DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2015**

Nama Mahasiswa : **Rio Afandi**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1213032067

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan : Pendidikan IPS

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

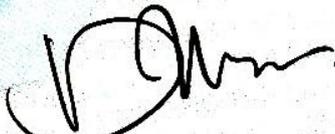
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Irawan Suntoro, M.S.
NIP 19560323 198403 1 003

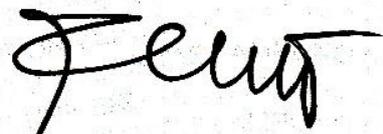

Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001

2. Mengetahui

Ketua Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi
Pendidikan PKN


Drs. Zulkarnain, M.Si.
NIP 19600111 198703 1 001


Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

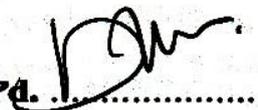
Ketua

: Dr. Irawan Suntoro, M.S.



Sekretaris

: Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.



Penguji

Bukan Pembimbing

: Dr. Adelina Hasyim, M.Pd.



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. Muhammad Fuad, M.Hum.

NIP. 19590722 198603 1/003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Juli 2016

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, adalah:

Nama : Rio Afandi
NPM : 1213032067
Program Studi : PPKn
Jurusan / Fakultas : Pendidikan IPS / Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Dusun III RT/RW 022/003, Desa Labuhan Ratu I
Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, Juli 2016



Rio Afandi
NPM 1213032067

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rio Afandi, yang dilahirkan di Desa Labuhan Ratu II pada tanggal 4 Mei 1993. Putra ketiga dari tiga bersaudara, buah kasih pasangan Bapak Ahmad Effendy dan Ibu Cikyah.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh adalah tingkat sekolah dasar di SD Negeri 1 Labuhan Ratu II yang diselesaikan pada tahun 2005. Jenjang SMP di SMP Negeri 1 Way Jepara yang diselesaikan pada tahun 2008. Jenjang SMA di SMA Negeri 1 Way Jepara yang diselesaikan pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN.

Penulis pernah aktif di organisasi kemahasiswaan kampus tingkat Fakultas yaitu HIMAPIS FKIP Unila. Penulis pernah pula mengikuti LKMMTD yang diselenggarakan oleh seluruh Hima di FKIP Unila.

Pada tahun 2014 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dengan tujuan Jakarta – Bandung – Yogyakarta – Solo. Tahun 2015 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Pekon Tanjung Baru, Kecamatan Ulubelu Kabupaten

Tanggamus, sekaligus melaksanakan Praktek Profesi Kependidikan (PPK) di SMAN 2 Ulubelu.

.

PERSEMBAHAN

Teriring doa dan rasa syukur kehadiran Allah SWT, dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati. Ku persembahkan sebuah karya kecil ini sebagai tanda bakti dan cinta kasihku kepada

Ayahanda Alimin dan ibunda Warnida tercinta serta kakak-kakakku dan adikku, terima kasih atas doa yang kalian berikan, keringat dan pengorbanannya, kalian selalu memberikan semangat, bimbingan serta nasehat yang selalu mengiringi langkah keberhasilanku.

*Almamater Tercinta
Universitas Lampung*

MOTTO

Pendidikan bukan persiapan untuk hidup, pendidikan adalah hidup itu sendiri.

(Jhon Dewey)

Jadilah mutiara di tengah gurun pasir yang luas

(Orang Tua Tercinta)

“Hidup Harus Selalu optimis”

(Rio Afandi)

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PERSEPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI PPKn UNIVERSITAS LAMPUNG TERHADAP KAMPANYE PEMILUKADA SERENTAK DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.”. Skripsi ini dibuat guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak atas segala bantuan baik berupa pemikiran, fasilitas, motivasi dan lain-lain demi terselenggaranya penulisan skripsi ini dari awal sampai akhir terutama ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fuad, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;

4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
6. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Lampung.
7. Bapak Dr. Irawan Suntoro, M.S., selaku pembimbing I sekaligus pembimbing akademik terimakasih atas bantuan, bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini ;
8. Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., selaku pembimbing II terimakasih atas bantuan, bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini ;
9. Ibu Dr. Adelina Hasyim, M.Pd., selaku pembahas I dan Juga Bapak Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd., selaku pembahas II terima kasih atas saran dan masukannya;
10. Bapak Muhammad Mona Adha, S.Pd., M.Pd. , Bapak Susilo, S.Pd., M.Pd., Bapak Rohman, S.Pd., M.Pd., Ibu Dayu Rika Perdana, S.Pd., M.Pd., Bapak Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd., dan Bapak Abdul Halim, S.Pd., M.Pd. ,selaku Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung terimakasih atas

segala ilmu yang telah diberikan, saran, masukan serta segala bantuan yang diberikan.

11. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta, Bapak Ahmad Effendy dan Ibu Cikyah tercinta terimakasih atas doa, senyum, airmata, bahagia, dukungan, kasih sayang yang telah diberikan dan semua pengorbanan kalian untukku yang tiada terkira benilaiannya dari segi apapun untukku;
12. Kakak-kakakku Alm.Kakak Adriyan Yuwansyah, Ayuk Aap dan Alby, Anda, serta keponakan-keponakanku, terima kasih atas dukungan, motivasi, dan pengorbanan yang kalian berikan padaku.
13. Seluruh Bapak Ibu Guruku terimakasih atas segala yang telah kalian ajarkan, yang mendewasakanku dalam bertutur, berfikir dan bertindak;
14. Teman-teman seperjuanganku (Zulfikar, Hadi, Anggi, Wahyu, Bayu, Deni, Idris, Soni, Rohim, Yanda, , Yoga) dan seluruh teman-teman di Prodi PPKn angkatan 2012 baik ganjil maupun genap serta kakak tingkat (Kak Muklas, Mbak Elisa, Kak Juanda, Kak Made dan yang Lainnya) dan adik tingkat, dari angkatan 2008 – 2015 yang tidak bias saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan yang kalian berikan;
15. Laboran Lab PPKn (Atika DL, Uus, Anggi, Mia) terima kasih atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan.
16. Bapak Desi Mulyawan, S.Pd., Selaku Kepala SMA N 2 Ulubelu danseluruh dewan guru beserta Staf juga murid – muridku yang ku banggakan, juga tak terlupa masyarakat Pekon Tanjung Baru terima kasih atas saran, serta motivasinya yang selalu kalian berikan kepadaku;

17. Teman-teman seperjuangan KKN dan PPK (Gusti,Ajeng, Nova, Niken, Indah,Eno, Eka,Yolanda, Trisna) terimakasih atas saran, serta motivasinya yang selalu kalian berikan kepadaku;
18. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya.Akhirnya penulis berharap semoga dengan kesederhanaanya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, Juli 2016
Penulis

Rio Afandi
NPM1213032067

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Fokus Penelitian.....	12
1.3 Rumusan Masalah.....	12
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1.4.1 Tujuan Penelitian	13
1.5 Kegunaan Penelitian	14
1.5.1 Kegunaan Teoritis.....	14
1.5.2 Kegunaan Praktis	14
1.6 Ruang Lingkup Penelitian.....	14
1.6.1 Ruang Lingkup Ilmu	14
1.6.2 Objek Penelitian.....	14
1.6.3 Subjek Penelitian	15
1.6.4 Wilayah Penelitian	15
1.6.5 Waktu Penelitian.....	15
II. TINJUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Tentang Persepsi	16
2.1.1 Pengertian Persepsi	16
2.2 Tinjauan Tentang Mahasiswa	20
2.2.1 Pengertian Mahasiswa.....	20
2.2.2 Karakteristik Mahasiswa.....	21
2.2.3 Tipe-Tipe Mahasiswa.....	21
2.3 Konsep Pendidikan Politik.....	23

2.3.1	Pengertian Pendidikan Politik.....	23
2.3.2	Unsur-Unsur Pendidikan Politik.....	25
2.4	Teori tentang Budaya Politik,Sosialisasi Politik,dan Partisipasi Politik.....	29
2.4.1	Teori Tentang Budaya Politik.....	29
2.4.2	Tinjauan Tentang Sosialisasi Politik.....	36
2.4.3	Tinjauan Tentang Partisipasi Politik.....	37
2.5	Tinjauan Tentang Kampanye.....	40
2.6	Tinjauan Tentang Pemilu Serentak.....	42
2.6.1	Pengertian Pemilu Serentak.....	42
2.6.2	Efisiensi Pemilu Serentak.....	46
2.7	Konsep Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan.....	47
2.7.1	Pengertian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan.....	47
2.7.2	Tujuan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan.....	48
2.7.3	Visi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan.....	49
2.7.4	Misi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan.....	49
2.7.5	Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Politik.....	50
2.8	Kerangka Pikir.....	51

III. METODELOGI PENELITIAN

3.1	Metode Penelitian.....	52
3.2	Populasi dan Sampel.....	53
3.3	Objek, Definisi Objek dan Rencana Pengukuran Objek Penelitian.....	54
3.3.1	Objek Penelitian.....	54
3.3.2	Definisi Objek Penelitian.....	55
3.3.3	Rencana Pengukuran Objek Penelitian.....	56
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	56
3.4.1	Teknik Pokok.....	56
3.4.2	Teknik Pelengkap.....	57
3.5	Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.....	57
3.5.1	Uji Validitas.....	57
3.5.1	Uji Reliabilitas.....	58
3.6	Teknik Analisis Data.....	63
3.7	Langkah-langkah Penelitian.....	64
3.7.1	Persiapan Penelitian.....	64
3.7.2	Penelitian Pendahuluan.....	64
3.8	Pengajuan Rencana Penelitian.....	65
3.9	Penyusunan Alat Pengumpulan Data.....	66

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	68
4.1.1	Profil Program Studi PPKn.....	68
4.1.2	Dasar Pendirian.....	68
4.1.3	Istilah PPKn dari Berbagai Kurikulum.....	69
4.1.4	Visi Dan Misi.....	69
4.1.5	Tujuan program Studi PPKn.....	70
4.1.6	Sarana Prasarana.....	71

4.1.7 Kompetensi Program Studi PPKn.....	72
4.2 Deskripsi Data	73
4.2.1 Pengumpulan Data	73
4.2.2 Penyajian Data	73
4.3 Pembahasan	89

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	97
5.2 Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 3.1	Jumlah Mahasiswa PRODI PPKn.....	51
Tabel 3.2	Distribusi Hasil Uji Coba Angket Persepsi Mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Lampung Terhadap Kampanye PEMILUKADA Serentak Di Provinsi Lampung Tahun 2015(item ganjil / X).....	56
Tabel 3.3	Distribusi Hasil Uji Coba Angket Persepsi Mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Lampung Terhadap Kampanye PEMILUKADA Serentak Di Provinsi Lampung Tahun 2015 (Item Genap / Y)	57
Tabel 3.4	Distribusi Hasil Antara item ganjil (X) dan item genap (Y)	59
Tabel 4.1	Distribusi Skor Angket Persepsi Mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Lampung Terhadap Kampanye PEMILUKADA Serentak Di Provinsi Lampung	73
Tabel 4.2	Distribusi Skor Angket Persepsi Mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Lampung Terhadap Materi Kampanye PEMILUKADA Serentak Di Provinsi Lampung	76
Tabel 4.3	Distribusi Skor Angket Persepsi Mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Lampung Terhadap Media Kampanye PEMILUKADA Serentak Di Provinsi Lampung	79
Tabel 4.4	Distribusi Skor Angket Persepsi Mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Lampung Terhadap Tempat Dan Waktu Kampanye PEMILUKADA Serentak Di Provinsi Lampung	82
Tabel 4.5	Distribusi Skor Angket Persepsi Mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Lampung Terhadap Subjek Kampanye PEMILUKADA Serentak Di Provinsi Lampung	85
Tabel 4.6	Distribusi Skor Angket Persepsi Mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Lampung Terhadap Kampanye PEMILUKADA Serentak Di Provinsi Lampung	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 4.1 Distribusi Frekuensi Persepsi Mahasiswa Prograam Studi PPKn Universitas Lampung Terhadap Kampanye PEMILUKADA Serentak Di Provinsi Lampung.....	74
Gambar 4.2 Distribusi Frekuensi Persepsi Mahasiswa Prograam Studi PPKn Universitas Lampung Terhadap Kampanye PEMILUKADA Serentak Di Provinsi Lampung.....	77
Gambar 4.3 Distribusi Frekuensi Persepsi Mahasiswa Prograam Studi PPKn Universitas Lampung Terhadap Kampanye PEMILUKADA Serentak Di Provinsi Lampung.....	80
Gambar 4.4 Distribusi Frekuensi Persepsi Mahasiswa Prograam Studi PPKn Universitas Lampung Terhadap Kampanye PEMILUKADA Serentak Di Provinsi Lampung.....	83
Gambar 4.5 Distribusi Frekuensi Persepsi Mahasiswa Prograam Studi PPKn Universitas Lampung Terhadap Kampanye PEMILUKADA Serentak Di Provinsi Lampung.....	86
Gambar 4.6 Distribusi Frekuensi Persepsi Mahasiswa Prograam Studi PPKn Universitas Lampung Terhadap Kampanye PEMILUKADA Serentak Di Provinsi Lampung.....	89

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Judul Skripsi
2. Surat Izin Penelitian Pendahuluan
3. Surat Keterangan Persetujuan Penelitian Pendahuluan
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
6. Kisi – Kisi Angket
7. Angket Responden
8. Distribusi Skor Angket Persepsi Mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Lampung Terhadap Kampanye PEMILUKADA Serentak Di Provinsi Lampung Tahun 2015

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pemilukada yang dilaksanakan serentak pada 9 desember 2015 sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2015. Pemilukada serentak 2015 akan dilaksanakan di 269 daerah pemilukada ini merupakan pemilukada serentak gelombang pertama menuju desain ideal pilkada, yakni serentak nasional untuk memilih DPR, DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta serentak daerah untuk memilih kepala daerah dan DPRD di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Setelah pilkada serentak 2015 di 269 daerah, maka dilanjutkan pilkada serentak gelombang kedua pada Februari 2017 di 99 daerah, gelombang ketiga pada Juni 2018 di 171 daerah.

Kemudian akan dilaksanakan masing-masing satu gelombang lagi sampai menuju pilkada serentak nasional 2027. Menanggapi ketentuan konstitusi tersebut belum lama ini KPUD Provinsi lampung melakukan “launching” pilkada serentak yang akan dilaksanakan di Provinsi Lampung, di acara itu pula KPUD Provinsi Lampung mengupayakan mengajak, menginformasikan dan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat ProvinsiLampung dalam Pemilihan serentak yang pertama kali dilaksanakan di tahun 2015 dan pelaksanaan kampanye

pemilukada di Provinsi Lampung dilaksanakan dari tanggal 28 agustus- 6 Desember 2015.

Pada tahun 2015 pemilihan kepala daerah (PILKADA) dilaksanakan secara serentak oleh 32 provinsi di Indonesia. Pilkada serentak dilaksanakan pada 9 desember 2015. salah satu provinsi yang mengadakan pilkada serentak 2015 adalah provinsi Lampung. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), PILKADA Lampung 2015 diikuti 8 kabupaten / Kota di 9.294 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar dan melibatkan total 4.024.760 pemilih di seluruh Lampung.

Berikut ini adalah pasangan calon kepala daerah yang mengikuti PEMILUKADA Serentak di Provinsi Lampung :

A. Pilkada Kota Bandar Lampung

1. Muhammad Yunus, SH. dan Ahmad Muslimin
2. Drs. Herman HN, MM. dan Muhammad Yusuf Kohar, SE., MM.
3. H. Tobroni Harun, ST., MM. dan Komarunizar, S.Ag.

B. Kota Metro

1. Drs. H. Sudarsono dan Taufik Hidayat, S.Sos., M.H.
2. Ir. H. Abdul Halim, M.M. dan Dr.H. Muchlido Aprilias
3. H. A. Pairin, S. Sos. Dan H. Djohan, S.E., M.M.
4. Ir. Supriadi, M.P. dan Megasari, S.E., S.Si., Apt., M.M.
5. Okta Novandra Jaya, S.Sos dan Drs. H. Wahadi, M.n.

C. Kabupaten Pesisir Barat

1. DR. Drs. H. Agus Istiqlal, SH, MH dan Erlina, SP, MH
2. Aria lukita budiawan, ST dan Ir. H efan Tolani, M.Si
3. Ir. H. Jamal Naser dan H. Syahrial, ST
4. Krt. Oking Ganda Miharja, SH dan Irawan Topani, SH, M.Kn

D. Kabupaten Lampung Selatan

1. M. Soleh Bajuri, S.Hi., M.Hi dan Ahmad Ngadelan Jawawi
2. H. Rycko Menoza SZP, SE., SH., MBA dan H. Eki Setyanto, SE
3. DR. H. Zainudin Hasan, M.Hum dan Nanang Ermanto

E. Kabupaten Way Kanan

1. H. Bustami Zainudin, S.Pd., MH dan Adinata
2. H. Raden Adipati Surya, SH., MM dan DR. H. Edward Antony, MM

F. Kabupaten Lampung Timur

1. H. Yusran Amirullah dan Drs. H. Sudarsono, M.Si
2. Hj. Chusnunia, M.Si, M.Kn dan H. Zaiful Bokhari, ST, MM

G. Kabupaten Pesawaran

1. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H> dan Mahmud Yunus
2. H. Okta Rijaya M, S.H.I. dan Salamu Solikhin
3. Fadhil Hakim YHS, Bba dan Zainal Abidin, S.Pt.
4. H. Dendi Romadhona k, S.T. dan Eriawan, S.H.

H. Kabupaten Lampung Tengah

1. Samidjo dan Fatoni
2. DR. Ir. H. Mustafa, M.H. dan Loekman Djoyosoemarto

3. H. Gunadi Ibrahim, S.E. dan K.H. Imam Suhadi
4. Mudiyanto Thoyib, B.A dan Musa Ahmad, S.Sos

Sumber : Data KPUD Provinsi Lampung

Teknis pelaksanaan pendaftaran tersebut KPUD Provinsi Lampung pun berusaha mengoptimalkan kinerja KPU sendiri sebagai penyelenggara pemilu serentak demi terciptanya pemilu yang demokratis, legitimate dan aman tentunya, perlu kita ingat dengan ketetapan pemerintah pusat untuk melaksanakan pemilu serentak ini tentunya banyak pro dan kontra yang terjadi di masyarakat, tekanan-tekanan dan tindakan untuk berusaha menggagalkan pemilu agar berlangsung patut di waspadai oleh KPU dan Pemerintah sebagai penyelenggara pemilu serentak 2015 ini.

Pada saat ini, *marketing* politik semakin memegang peranan penting dalam pemilihan umum (pemilu). Akibatnya yang lebih menonjol saat ini yaitu politik 'kemasan'. Sistem dan budaya politik seperti ini akan menguntungkan bagi pihak-pihak yang memiliki kemampuan besar, terutama biaya dalam membangun pencitraan. Dari jauh hari, banyak calon kontestan Pemilu membayar konsultan atau merekrut orang-orang yang ahli dalam politik untuk menyusun strategi dan skenario yang efektif memenangkan pemilu. Kampanye politik merupakan bagian penting dalam marketing politik. Di samping kampanye resmi yang diatur undang-undang, sebelum pemilu bahkan sudah ada pemasangan atribut-atribut partai atau gambar-gambar perorangan yang bisa dianggap sebagai kampanye terselubung.

Merujuk pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kampanye yaitu kegiatan-kegiatan penyampaian visi, misi, dan program pada waktu tahapan kampanye Pemilu. Dalam Undang-undang ini, selain waktu, diatur juga soal materi kampanye, metode kampanye, larangan dalam kampanye dan sanksi atas pelanggaran kampanye, yang semua itu nantinya akan diatur secara lebih teknis dalam peraturan-peraturan KPU. Permasalahannya, untuk kegiatan-kegiatan di luar tahapan, penyelenggara Pemilu biasanya tidak bisa mengambil tindakan atau memberikan sanksi terhadap pihak-pihak, baik partai politik maupun orang-per-orang yang melakukan kampanye di luar yang telah diatur dalam Undang-undang.

Kampanye-kampanye atau kegiatan berbentuk kampanye melalui media dan pemasangan atribut ini telah terlalu banyak memenuhi ruang-ruang dan kehidupan kita. Intensitas kegiatan berbentuk kampanye semakin meningkat masa liburan dan hari besar keagamaan. Masyarakat seperti dipaksa dan didoktrin habis-habisan oleh berbagai kekuatan politik atau pihak yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah. Iklan-iklan yang direka sedemikian rupa serta janji-janji yang diucapkan setiap saat dipertontonkan dan diperdengarkan.

Selama ini, tahapan Pemilu yang paling menjadi perhatian yaitu pemungutan dan penghitungan suara. Fokus perhatian seluruh *stakeholders* politik dan Pemilukada yang hanya tertuju pada kalah-menang seringkali menyebabkan kurangnya perhatian dan pemahaman akan pentingnya tahapan-tahapan lainnya dalam pemilukada, terutama persoalan kampanye yang baik dan berkualitas.

Pasal 77, UU No. 8 Tahun 2012 dinyatakan kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggungjawab. Makna dari bertanggungjawab berarti kampanye dilaksanakan sesuai dengan undang-undang atau ketentuan yang berlaku. Atau bisa juga bermakna setiap janji dalam kampanye benar-benar harus dapat dipertanggungjawabkan nantinya setelah memperoleh jabatan atau kekuasaan.

Sebagaimana pengertian dari kampanye yang merupakan tahapan penyampaian visi, misi dan program-program kontestan pemilu, pada masa kampanye-lah kontestan pemilu berkomunikasi dengan masyarakat atau calon pemilih. Namun, apakah kampanye dengan berbagai janji yang disampaikan pada pemilu dan pemilihan kepala daerah kini sudah benar-benar dilakukan dengan jujur? Walaupun para kontestan pemilu sedang berlomba menduduki jabatan, sudah seharusnya tetap benar-benar tulus untuk membuat perbaikan di masa datang. Persoalan kejujuran adalah permasalahan integritas dari para kontestan itu sendiri. Tak jarang kontestan Pemilu yang dulu telah dipilih oleh masyarakat akhirnya dihujat akibat janji tak bersesuaian dengan kenyataan setelah menjabat. Kenyataan ini, lama-kelamaan akan memperdalam jurang ketidakpercayaan antara masyarakat dan elit politik di negara kita.

Tahapan kampanye tanpa pemahaman yang baik dari kontestan ataupun masyarakat hanya akan terlihat seperti pesta umbul-umbul, baliho, spanduk, poster, stiker dengan berbagai slogan dan janji-janji kampanye. Semua atribut kampanye ini begitu banyak bertebaran di waktu masa pemilu dan pemilihan kepala daerah. Bahkan dalam bentuk kalender, souvenir dan bentuk lainnya masuk sampai ke

rumah-rumah warga. Belum lagi kampanye pemilu dan pemilihan kepala daerah yang memenuhi media televisi. Kontestan pemilu atau calon-calon kepala daerah yang rata-rata kini memiliki uang tak tanggung-tanggung membayar TV, lengkap dengan artis-artisnya. Media internetpun tak luput dijadikan media kampanye para kontestan pemilu.

Tujuan dari penggunaan berbagai media tersebut tentunya agar kontestan pemilu atau pasangan calon kepala daerah dikenali dan mendapat simpati masyarakat yang akan memilih. Namun tidak jarang juga para kontestan pemilu melanggar aturan atau ketentuan kampanye. Pada saat masa kampanye seringkali ditemukan atribut-atribut menempel dan tergantung di pohon-pohon pelindung, fasilitas-fasilitas umum dan kadang-kadang yang lebih meresahkan masyarakat tentunya setelah kampanye atribut itu tidak dibersihkan lagi.

Memperhatikan fenomena kampanye dan marketing politik seperti gambaran di atas, perlu rasanya perbaikan kualitas dan metode kampanye. Perbaikan ini tentu akan melibatkan *stakeholders* pemilu dan pemilihan kepala daerah, seperti KPU, partai politik dan juga masyarakat.

KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan kepala daerah dapat memanfaatkan ruang yang diberikan undang-undang untuk mengemas kampanye yang lebih dialogis dan juga terarah agar tujuan tahapan kampanye untuk penyampaian visi, misi dan program betul-betul bisa terlaksana serta bisa berjalan tertib. Harapannya, jika memungkinkan secara anggaran dan teknis, kampanye Pemilu ke depan dilaksanakan oleh KPU seperti debat presiden atau kepala daerah, dimana wakil-wakil partai peserta

Pemilu bisa menyampaikan visi, misi dan program mereka dalam sebuah forum debat. Dengan begitu penjelasan pokok-pokok gagasan tentang pembangunan dan arah kehidupan berbangsa dan bernegara oleh wakil-wakil partai diharapkan betul-betul dipahami oleh masyarakat yang kemudian berpengaruh pada pilihan mereka nantinya.

Calon kepala daerah juga diharapkan memiliki itikad baik pada saat kampanye Pemilu dengan menyampaikan hal-hal yang sungguh-sungguh akan mereka perjuangkan, bukan sekedar janji palsu dan klise. Penyampaian visi, misi dan program partai politik atau kontestan dalam setiap Pemilu hendaknya betul-betul bisa diukur dan terukur. Tanpa kejelasan *platform* atau visi, misi dan program masing-masing partai atau kontestan pemilu, masyarakat atau kelompok masyarakat sipil akan kesulitan melakukan evaluasi terhadap pemerintahan yang ada. Dalam kaitan inilah tanggungjawab partai politik, khususnya, memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.

Masyarakat sebagai pihak yang menjadi sasaran dari kampanye dan *marketing* politik juga dituntut untuk bersikap kritis. Masyarakat yang kritis terutama mahasiswa tentu bisa memberikan penilaian yang objektif terhadap visi, misi dan program kontestan pemilukada.

Mahasiswa PPKn sendiri contohnya masih banyak yang belum mengetahui terkait akan diadakannya pemilukada serentak pada desember ini, meskipun bakal calon Kepala daerah sudah bermunculan di Kota Bandar Lampung ini namun sosialisasi tentang pilkada serentak desember ini masih kurang, banyak mahasiswa yang belum tau kegiatan kampanye yang dilakukan calon kepala daerah di kota bandar

lampung. Hal yang seperti ini yang sepatutnya diperhatikan oleh pemerintah Kota bandar lampung karena masyarakat lah yang akan menentukan siapa kepala daerah yang mereka inginkan jadi pilkada serentak tidak hanya dijadikan sebagai momentum untuk menentukan kepala daerah saja tapi dijadikan sebagai pendidikan politik yang substantif demi terciptanya demokrasi yang substansial pul a di Kota bandar lampung khususnya.

Terutama dikalangan mahasiswa sebagai agen perubahan yang memiliki pemikiran-pemikiran kritis dan rasional dalam menghadapi perkembangan isu politik yang terjadi di Indonesia. Mahasiswa umumnya berorientasi pada nilai-nilai ideal dan kebenaran. Karena orientasi idealis dan pembelaannya pada kebenaran, sebagian ahli memasukkannya ke dalam kelompok cendekiawan atau seperti yang dikatakan Lewis Coser bahwa mahasiswa tidak pernah puas dengan kenyataan sebagaimana adanya, mereka mempertanyakan kebenaran yang berlaku pada zamannya dan mencari kebenaran yang lebih tinggi dan lebih luas (Lewis, 1997:16). Orientasi pada nilai-nilai ideal dan kebenaran membuat mahasiswa peka dan peduli terhadap persoalan-persoalan dilingkungannya terutama yang menyangkut bentuk-bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Kepedulian itu biasanya diekspresikan dalam bentuk-bentuk protes, diskusi, aksi maupun demonstrasi. Mahasiswa dalam menjalankan proses perkuliahan tidak hanya dituntut untuk menjalankan kewajiban akademiknya, akan tetapi mahasiswa dituntut untuk mampu berinteraksi dan bersosialisasi satu sama lain. Interaksi tersebut bukan hanya dapat dilakukan ketika proses perkuliahan, tetapi juga dapat dilakukan dengan aktif berorganisasi di organisasi kemahasiswaan yang ada, baik organisasi di dalam kampus (internal), seperti Badan Eksekutif

Mahasiswa (BEM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), maupun organisasi di luar kampus (eksternal) seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan organisasi lainnya. Aktifitas-aktifitas organisasi tersebut membuat mahasiswa memiliki banyak jaringan, mengenal banyak kepentingan, baik dari akar rumput hingga berbagai pemangku kepentingan yang ada.

Hal ini juga memudahkan mahasiswa untuk dikelompokkan sehingga menciptakan kekompakan dalam kehidupan kemahasiswaan (unila.ac.id). Kelompok-kelompok mahasiswa atau himpunan-himpunan mahasiswa seringkali dalam momentum-momentum politik dilihat sebagai objek yang menjanjikan untuk mensukseskan suatu kepentingan, baik kepentingan jangka pendek untuk mensukseskan maupun membatalkan program pemerintah, ataupun jangka panjang untuk membantu mensukseskan pemilihan umum (memenangkan kandidat tertentu). Hal ini dipandang menjanjikan, karena selain mahasiswa merupakan komponen yang solid, juga daya kritis mahasiswa dengan titlanya sebagai *agent of change* dan *agent of control* mejadikan mahasiswa lebih dekat dengan masyarakat.

Selain mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan, ada juga tipe mahasiswa yang cenderung acuh tak acuh (apatis) terhadap pergerakan mahasiswa dan isu-isu sosial politik di masyarakat. Namun dalam momentum pemilu pada tahun ini, ternyata mahasiswa yang cenderung apatis tersebut turut aktif pula dalam isu-isu yang berkembang, terutama pada pelaksanaan kampanye. Hal ini dikarenakan peran media yang mempublikasikan isu-isu yang ada.

Mahasiswa yang biasanya tidak aktif merespon isu-isu tersebut menjadi aktif, tidak kalah dengan mahasiswa yang aktif berorganisasi, sehingga situasi kampus penuh dengan diskusi-diskusi terkait pemilu yang menyebabkan banyaknya persepsi-persepsi yang berkembang dikalangan mahasiswa khususnya di program studi PPKn Universitas Lampung.

Penulis mengambil penelitian di lingkungan FKIP PPKn, dikarenakan FKIP PPKn merupakan tempat peneliti berkuliah dan interaksi sosial yang penulis rasakan selama pemilu berlangsung dengan intensitas yang cukup tinggi terkait isu-isu yang menimpa masing-masing calon kepala daerah. Selain itu, mahasiswa FKIP PPKn merupakan mahasiswa yang mengkaji isu sosial politik yang berkembang selama proses pemilu. Berbekal pengetahuan mengenai kajian sosial politik menjadikan proses pemilu ini sebagai laboratorium untuk menganalisis berbagai isu yang berkembang di kubu masing-masing kandidat, tidak hanya sebatas itu mahasiswa program studi PPKn juga memiliki peranan untuk memberikan pencerdasan politik bagi masyarakat ditengah hingar bingar perbedaan kubu dari tingkat elit hingga akar rumput yang tensinya semakin naik ditambah posisi media massa yang tidak lagi netral. Berdasarkan berbagai fenomena sosial politik yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti menganggap penelitian tentang ***“Persepsi Mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Lampung Terhadap Kampanye Pemilu Serentak di Provinsi Tahun 2015”*** penting untuk dilakukan guna mengembangkan wawasan dan analisis peneliti.

1.2 Fokus Penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah maka fokus penelitian ini adalah “Persepsi Mahasiswa program studi PPKn Universitas Lampung terhadap kampanye PEMILUKADA serentak di Provinsi Lampung Tahun 2015. Dengan sub fokus penelitian adalah :

1. Persepsi mahasiswa program studi PPKn Universitas Lampung terhadap materi kampanye
2. Persepsi mahasiswa program studi PPKn Universitas Lampung terhadap media kampanye
3. Persepsi mahasiswa program studi PPKn Universitas Lampung terhadap tempat dan waktu kampanye
4. Persepsi mahasiswa program studi PPKn Universitas Lampung terhadap subyek atau pelaku yang melakukan kampanye
5. Persepsi mahasiswa program studi PPKn Universitas Lampung terhadap sasaran kampanye

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian dan sub fokus penelitian , penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu, “Bagaimanakah Persepsi Mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Lampung Terhadap Kampanye Pemilukada Serentak di Provinsi Lampung Tahun 2015 ?”, selanjutnya diteliti melalui pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Persepsi mahasiswa program studi PPKn Universitas Lampung terhadap kampanye PEMILUKADA Serentak Di Provinsi Lampung

2. Bagaimanakah Persepsi mahasiswa program studi PPKn Universitas Lampung terhadap materi kampanye
3. Bagaimanakah Persepsi mahasiswa program studi PPKn Universitas Lampung terhadap media kampanye
4. Bagaimanakah Persepsi mahasiswa program studi PPKn Universitas Lampung terhadap tempat dan waktu kampanye
5. Bagaimanakah Persepsi mahasiswa program studi PPKn Universitas Lampung terhadap subyek atau yang melakukan kampanye

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Persepsi mahasiswa program studi PPKn Universitas Lampung terhadap kampanye pemilukada serentak di Provinsi Lampung Tahun 2015, secara khusus menganalisis dan mendeskripsikan :

1. Persepsi mahasiswa program studi PPKn Universitas Lampung terhadap kampanye PEMILUKADA Serentak di Provinsi Lampung
2. Persepsi mahasiswa program studi PPKn Universitas Lampung terhadap materi kampanye
3. Persepsi mahasiswa program studi PPKn Universitas Lampung terhadap media kampanye
4. Persepsi mahasiswa program studi PPKn Universitas Lampung terhadap tempat dan waktu kampanye
5. Persepsi mahasiswa program studi PPKn Universitas Lampung terhadap subjek yang melakukan kampanye

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan ini yaitu :

1.5.1 Secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan, serta memperkaya studi mengenai komunikasi politik terutama dalam Pemilu di Indonesia. Dan juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1.5.2 Secara praktis,

- a. Sebagai pertimbangan komisi pemilihan umum Provinsi Lampung untuk memperbaiki kegiatan kampanye pemilihan umum yang akan datang.
- b. Sebagai bahan suplemen mata pelajaran Pkn pokok bahasan Partisipasi politik SMA kelas XI.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.1 Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan khususnya wilayah kajian pendidikan politik dan kewarganegaraan.

1.6.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Mahasiswa program studi PPKn Universitas Lampung angkatan 2012-2015.

1.6.3 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Persepsi Mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Lampung Terhadap Kampanye Pemilukada Serentak di Provinsi Lampung yang berlangsung dari tanggal 28 Agustus hingga 6 Desember 2015..

1.6.4 Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian ini di laksanakan di Kampus Universitas Lampung.

1.6.5 Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan FKIP Universitas Lampung tanggal 23 Desember 2015 , Nomor : 8815/UN26/PL/2015 dan surat izin penelitian oleh Dekan FKIP Universitas Lampung tanggal 18 april 2016, Nomor : 2727/UN26/PL/2016.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Persepsi

2.1.1 Pengertian persepsi

Kata persepsi berasal dari unsur kata serapan bahasa Inggris *perception*. Kata *perception* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai pandangan, perasaan, daya penglihatan/daya tangkap, pengetahuan, kesadaran, pengamatan, penglihatan. Pandangan ini memiliki pemahaman yang berbeda-beda, sehingga secara logis persepsi atau pandangan seseorang tentang sesuatu masalah atau masalah objek tertentu adalah sama. Banyak stimulus yang dihadapi seseorang dalam waktu tertentu yang relatif bersamaan menuntut orang yang bersangkutan untuk menyelesaikannya.

Secara teoritis, Slameto(2003:102) menyatakan bahwa “persepsi adalah proses yang masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium.

Bagi seorang guru, mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip yang bersangkutan dengan persepsi yang bersangkutan-paut dengan persepsi sangat penting karena

:

1. Makin baik suatu objek, orang, peristiwa atau hubungan diketahui, makin baik objek, orang, peristiwa, atau hubungan tersebut dapat diingat
2. Dalam pengajaran, menghindari salah pengertian merupakan hal yang harus dapat dilakukan oleh seseorang guru, sebab salah pengertian akan menjadikan siswa belajar sesuatu yang keliru atau tidak relevan, dan
3. Jika dalam menganjurkan sesuatu guru perlu mengganti benda yang sebenarnya dengan gambar atau potret dari benda tersebut maka guru harus mengetahui bagaimana gambar atau potret tersebut harus dibuat agar tidak terjadi persepsi keliru

Solso dkk (2007:75) menyatakan bahwa “Persepsi yakni melibatkan kognisi tingkat tinggi dalam menginterpretasikan informasi sensorik. Mengacu pada interpretasi hal-hal yang kita indera”. Ketika kita membaca buku, mendengarkan iPod, dipijat orang, mencium parfum, atau mencicipi sushi, kita mengalami lebih dari sekedar stimuli sensorik. Kejadian-kejadian sensorik tersebut diproses sesuai pengetahuan kita tentang dunia, sesuai budaya, pengharapan, bahkan disesuaikan dengan orang yang bersama kita saat itu. Hal-hal tersebut memberikan makna terhadap pengalaman sensorik sederhana- dan itulah persepsi.

Istilah persepsi ini diartikan bermacam-macam oleh para ahli, bagi seorang ahli Rakhmat (2005:51) mengatakan bahwa “*persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan*”. Memberikan makna pada stimuli inderawi (sensory stimuli). Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas. Sensasi adalah bagian dari persepsi. Walaupun begitu, menafsirkan makna informasi inderawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi dan

memori. Sementara Yusof (dalam Marwita, 2007:6) menyatakan bahwa persepsi adalah sebagai tanggapan, pandangan atau perasaan seseorang terhadap suatu perkara mengikuti pengetahuan yang ada pada seseorang itu. pandangan atau tanggapan ini di pengaruhi oleh beberapa perkara seperti keadaan sekitaran, taraf pendidikan, pengalaman dan sebagainya. Senada dengan itu Robbins dkk(, 2003:175) menyatakan persepsi adalah proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka.

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan yaitu merupakan proses diterimanya stimulasi oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensorik. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja melainkan stimulasi tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi Walgito (2004:87). Disamping itu Slameto (2010:102) menyatakan bahwa persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia melalui persepsi manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa dan pencium.

Pius dan Danu (2008:449) dalam kamus bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa persepsi adalah tanggapan langsung dari seseorang terhadap sesuatu yang terjadi. Sedangkan Jalaludin Rahmat (dalam Rahman, 2009:23) mendefinisikan persepsi sebagai pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Purwadarminta (dalam Muksin, 2007:7) mendefinisikan bahwa persepsi diartikan sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu. Persepsi tidak hanya tergantung pada sifat-sifat rangsangan fisik, tetapi juga pada pengalaman dan sikap individu. Pengalaman dapat diperoleh dari semua pengamatannya di masa lampau atau dapat juga dipelajari, karena dengan belajar seseorang akan dapat memperoleh pengalaman. Hasil dari pengalaman yang berbeda-beda akan membentuk suatu pandangan yang berbeda sehingga menciptakan proses pengamatan yang berbeda sehingga menciptakan proses pengamatan yang berbeda pula.

Persepsi setiap orang itu berbeda karena sebagai makhluk hidup setiap manusia memiliki pandangan yang berbeda sesuai dengan tingkat pemahamannya. Persepsi terkait dengan obyek yang diamatinya, sehingga masyarakat yang tinggal disuatu daerah lebih melihat banyak tentang hal-hal yang terkait dengan lingkungannya.

Hubungan antara lingkungan dengan manusia dan tingkah lakunya adalah hubungan timbal balik yang saling terkait dan saling mempengaruhi, bertambah tinggi pengetahuan dan pemahaman seseorang pada objek yang di persepsikan maka baik pula bentuk persepsi orang tersebut terhadap objek.

Berdasarkan teori yang dikemukakan para ahli diatas, maka persepsi adalah sebagai suatu tanggapan atau pandangan dan perasaan, serta penghayatan seseorang terhadap sesuatu perkara berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya.

2.2 Tinjauan Tentang Mahasiswa

2.2.1 Definisi Mahasiswa

Menurut Rahmawati (2006:127). “Mahasiswa merupakan kalangan muda yang berumur antara 19 sampai 28 tahun yang memang dalam usia tersebut mengalami peralihan dari tahap remaja ketahap dewasa”. Sosok mahasiswa juga dikenal dengan nuansa kedinamisan dan sikap kenyataan objektif, sistematis dan rasional. Sedangkan menurut Hayatun (1996:24), “mahasiswa merupakan kelompok generasi muda elit dalam masyarakat yang mempunyai sifat dan watak yang kritis, keberanian dan kepeloporan”. Berperan sebagai kekuatan moral dan berfungsi sebagai control sosial serta sebagai duta pembaharu masyarakat. Konsep mahasiswa tidak berbeda dengan pemuda, konsep ini identik dengan nilai-nilai yang melekat pada diri manusia tersebut. Mahasiswa sekaligus adalah pemilik masa depan bangsa yang diharapkan mampu berperan aktif sebagai agen perubahan yang perlu dibina. Mahasiswa adalah insane-insan intelektual yang berada pada perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri yang dididik untuk menjadi calon intelektual bangsa (Wirawan, 1987:46).

Menurut Slamet (1986:42), mahasiswa adalah “manusia yang memiliki kemampuan akademis, ciri karakter atau identitas, mutu kerja dan cara berfikirnya lebih dalam dan memiliki *trade mark* yang berbeda dengan warga masyarakat lainnya dan berkiprah di perguruan tinggi”. Dalam hal ini mahasiswa berfungsi sebagai pemberi informasi, pemberi motivasi, pelancar proses difusi inovasi dan penghubung antara sistem yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi masyarakat.

2.2.2 Karakteristik Mahasiswa

Damanhuri (1985) memberikan cirri-ciri mahasiswa sebagai berikut:

1. Mahasiswa adalah kelompok orang muda, oleh karena itu karakteristik ini diwarnai oleh sifat yang pada umumnya tidak selalu puas terhadap lingkungannya dimana mereka menginginkan berbagai perubahan dengan cepat, dinamik dan mendasar (radikal).
2. Mahasiswa adalah kelompok yang berada pada sistem pendidikan tinggi.

2.2.3 Tipe-tipe Mahasiswa

Adnan dan Pradiansyah (1999:131-141) mengklasifikasi mahasiswa ke dalam 5 tipe, yaitu :

1. Kelompok Idealis Konfrontatif

Mereka adalah mahasiswa yang aktif dikelompok diskusi atau lembaga swadaya masyarakat. Kegiatan mereka senantiasa bernuansa pemikiran kritis mengenai perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta memperjuangkan hak-hak rakyat yang tertindas. Ciri dari kelompok ini adalah non-kooperatif. Kelompok ini bersikap menolak posisi pemerintah karena mereka berkeyakinan bahwa pemerintah yang berkuasa saat itu tidak sesuai dengan norma, nilai nilai, dan prinsip-prinsip demokrasi keadilan dan hak asasi manusia.

2. Kelompok Idealis Realitas

Kelompok ini juga aktif diberbagai kelompok diskusi atau lembaga swadaya masyarakat. Kelompok ini banyak menggagas ide-ide perbaikan kehidupan

berbangsa dan bernegara. Kelompok ini cenderung kompromistis dan kooperatif serta tidak terang-terangan menentang pemerintah dan tetap berusaha mencari jalan di tengah iklim politik.

3. Kelompok Oppurtunis

Berbeda dengan kedua kelompok, kelompok ini cenderung untuk mendukung program-program pemerintah dan berpihak pada pemerintahan (termasuk kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat).

4. Kelompok Profesional

Mereka adalah para mahasiswa yang berorientasi profesionalisme dan kurang berminat terhadap masalah-masalah ekonomi, politik, sosial, dan budaya bangsa. Mereka memilih untuk menyelesaikan *study* secepat mungkin kemudian memperoleh pekerjaan yang dapat menjamin masa depan rakyat.

5. Kelompok Glamour

Kelompok ini sama dengan kelompok *profesional* yang kurang berminat terhadap masalah-masalah ekonomi, politik, serta budaya bangsa. Perbedaannya kelompok ini memiliki kecenderungan rekreatif, cirri yang menonjol adalah penampilan berbusana yang cenderung glamour dan gaya hidup yang sangat mengikuti mode. Berdasarkan beberapa pengertian, karakteristik dan tipe mahasiswa di atas maka dapat disimpulkan mahasiswa adalah orang yang belajar atau yang menuntut ilmu pada suatu perguruan tinggi dan merupakan bagian dari subsistem masyarakat yang mempunyai jiwa intelektual tinggi dan mempunyai sifat kritis terhadap fenomena politik yang terjadi.

Dari penjelasan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Berperan sebagai kekuatan moral dan berfungsi sebagai control sosial serta sebagai duta pembaharu masyarakat.. Mahasiswa adalah pemilik masa depan bangsa yang diharapkan mampu berperan aktif sebagai agen perubahan yang perlu dibina. Mahasiswa adalah insane-insan intelektual yang berada pada perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri yang dididik untuk menjadi calon intelektual bangsa.

2.3 Konsep Pendidikan Politik

2.3.1 Pengertian Pendidikan Politik

Istilah ‘pendidikan politik’ merupakan istilah yang kerap digunakan oleh para praktisi pemberdayaan masyarakat untuk menggambarkan setiap proses yang dilakukan dalam kerangka meningkatkan kesadaran sosial masyarakat terhadap dinamika politik yang terjadi.

Meski demikian, dalam berbagai literatur jarang sekali ditemukan definisi yang baku mengenai istilah “pendidikan politik”. Jika istilah “pendidikan” didefinisikan sebagaimana uraian pada sub bab di atas, lalu “politik” didefinisikan sebagaimana Miriam Budiardjo (1988: 8), “politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu, menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu”. Konsep-konsep pokok dalam politik

adalah; negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan pembagian atau alokasi.

Sederhananya, adalah setiap upaya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat untuk membebaskan manusia dari keterkungkungan kemiskinan sosial untuk kemudian memiliki kontribusi pada proses politik yang sedang terjadi, terutama pada persoalan yang menyangkut langsung dengan kepentingan hidupnya.

Dalam ranah teori politik klasik, Machiavelli menyatakan bahwa pendidikan politik perlu diberikan kepada orang-orang “yang belum tahu”. Pendidikan politik tersebut dimaknai bukan sebagai pendidikan politik yang negatif tentang pembenci tiran, melainkan pendidikan positif, yaitu diberikan pada orang-orang yang mengakui pentingnya pendidikan tersebut, sekalipun pendidikan tersebut merupakan alat tirani yang mengejar suatu keuntungan tertentu (Gramsci, 2001: 17). Rusadi Kantaprawira (1977:54) menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu fungsi dari struktur politik di dalam masyarakat. Dengan “menyamarkan” pendidikan politik dengan sosialisasi politik, Kantaprawira mendefinisikan pendidikan politik sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat, dan akhirnya rakyat dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politik tersebut. Pendidikan politik tersebut dapat diselenggarakan antara lain melalui:

1. Bahan-bahan yang dapat dibaca (readable, legible) seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain yang bersifat publikasi massa dan yang bisa membentuk pendapat umum,

2. Siaran yang dapat didengar (audible) dan televisi serta film yang dapat dilihat dan didengar (bersifat audio-visual),
3. Lembaga-lembaga, asosiasi-asosiasi dalam masyarakat seperti masjid dan gereja yang menyampaikan khotbah, serta kemungkinan juga melalui pendidikan formil ataupun informil.

Maka dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan diatas bahwa pendidikan politik merupakan suatu perangkat dengan mana kelompok sosial melanjutkan keberadaannya memper- barui diri sendiri dan mempertahankan ideal-idealnya dalam menghadapi berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik dengan berbagai tujuannya.

2.3.2 Unsur-Unsur Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan bagian tak terpisahkan dari sosialisasi politik, baik secara konseptual maupun dalam prakteknya, sebab unsur-unsur yang terdapat di dalam pendidikan politik dapat diasumsikan sama dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam sosialisasi politik. Unsur-unsur itu mencakup;

1. Nilai-nilai politik, yang didefinisikan oleh Frans Bona Sihombing (1984:27) sebagai;
 - Seperangkat taksiran atau perhitungan yang diberikan atas kebijakan-kebijakan politik.
 - Kebijakan-kebijakan yang telah ditaksirkan tersebut dihadapkan dengan kenyataan-kenyataan politik, sehingga menimbulkan pertanyaan; tindakan-tindakan politik apa saja yang seharusnya terlaksana?

- Tindakan-tindakan politik yang seharusnya terlaksana tersebut ditingkatkan menjadi suatu keharusan politik. Keharusan politik dalam arti mempertimbangkan melalui apa yang baik dan apa yang benar itu berakhir dengan suatu keputusan bahwa keharusan politik tersebut harus terlaksana karena memang itulah sebaiknya.
- Yang sebaiknya harus terlaksana itu bersifat memajukan
- Yang sebaiknya harus terlaksana dan memajukan itu harus dapat diterapkan dalam bentuk tingkah laku yang ditentukan oleh sifat kebudayaan dari suatu bangsa.
- Penerapan dalam bentuk tingkah laku itu menimbulkan tingkatan perubahan yang berfaedah.
- Perubahan yang berfaedah itu meliputi apa saja yang mungkin terpenting dari suatu kepentingan kemungkinan politik.

2. Pengetahuan politik.

Jack Dennis merumuskan pengetahuan politik dalam tiga variabel, yaitu; pengetahuan tentang pemerintah, pengetahuan tentang aturan main politik, dan pengetahuan tentang lingkungan dan masyarakat. (Sementara itu, Kurniati Negara (1993:2) berpendapat bahwa “pengetahuan politik berarti segala yang diketahui berkenaan dengan macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik, yang meliputi pengetahuan tentang tujuan negara, lembaga-lembaga negara dan lain-lain”.

3. Sikap politik

Menurut Sudijono Sastroatmojo (1995:4), sikap politik adalah kesiapan bereaksi terhadap objek tertentu yang bersifat politik, sebagai hasil penghayatan terhadap objek tersebut. Sikap belum merupakan suatu tindakan aktivitas, akan tetapi baru merupakan suatu kecenderungan dari suatu sikap tertentu, dan dapat diperkirakan tindakan apa yang akan dilakukan berkenaan dengan objek-objek yang dimaksud. Menurut Alfian, sikap dan tingkah laku politik adalah kecenderungan seseorang untuk bertindak (diam juga merupakan sikap) terhadap suatu keadaan. Kalau seseorang merasa terdorong untuk merubah suasana lingkungan yang sudah jauh dari demokratis menjadi lebih demokratis, itupun akan mencerminkan sikap dan tingkah laku politiknya. Ibid., hal 29

Sikap dan tingkah laku politik itu ditentukan oleh apa yang terkandung dalam dirinya, seperti idealisme, tingkat kecerdasan, faktor biologis, keinginan hati, juga oleh suasana lingkungan, kebudayaan, kehidupan bernegara, politik, sosial, ekonomi dan sebagainya.

Dengan kata lain, seperti dinyatakan oleh Haryanto, pendidikan politik merupakan perwujudan nyata dari sosialisasi politik. Dalam kontekstualisasinya dengan fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan politik, keduanya dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran politik anggota, kader, atau simpatisan partai. Termasuk di dalamnya adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan rakyat mengenai hak-hak politiknya dalam kehidupan bernegara (Naning Mardiniah, dkk., 2004: 102).

Pendidikan politik juga berkaitan erat dengan pembangunan budaya politik yang tinggi. Budaya politik yang dimaksud, sebagaimana dikatakan oleh Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, merupakan suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu. Dengan orientasi ini, mereka menilai serta mempertanyakan tempat-tempat peranan mereka di dalam sistem politik. (Didi Turmuzi, 2004: 2)

Sikap individu dan masyarakat dalam sistem politik, jelas Almond dan Verba, dapat diukur dengan menggunakan ketiga komponen yaitu kognitif, afektif, dan evaluatif. Komponen kognitif misalnya tingkat pengetahuan seseorang mengenai perkembangan sistem politik, para elite birokrasi, kebijakan-kebijakan yang diambil, dan simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politik. Komponen afektif berbicara mengenai aspek perasaan seorang warga negara yang khas terhadap aspek-aspek sistem politik tertentu yang membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu. Sedangkan dalam komponen evaluatif, orientasi warga negara ditentukan oleh evaluasi moral yang memang telah dimilikinya. Dalam konteks keterkaitan pendidikan politik dengan budaya politik ini pula, pendapat yang berbeda ditulis oleh

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik merupakan bagian tak terpisahkan dari sosialisasi politik, baik secara konseptual maupun dalam prakteknya, sebab unsur-unsur yang terdapat di dalam pendidikan politik dapat diasumsikan sama dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam sosialisasi politik. Unsur-unsur itu mencakup: nilai-nilai politik, sikap-sikap politik

2.4 Teori Tentang Budaya Politik, Partisipasi Politik, Dan Sosialisasi Politik.

Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lain dalam upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Kehidupan manusia di dalam masyarakat, memiliki peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Setiap warga negara, dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung dengan praktik-praktik politik. Jika secara tidak langsung, hal ini sebatas mendengar informasi, atau berita-berita tentang peristiwa politik yang terjadi. Dan jika secara langsung, berarti orang tersebut terlibat dalam peristiwa politik tertentu.

Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar warga negara dengan pemerintah, dan institusi-institusi di luar pemerintah (non-formal), telah menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik. Oleh karena itu, seringkali kita bisa melihat dan mengukur pengetahuan-pengetahuan, perasaan dan sikap warga negara terhadap negaranya, pemerintahnya, pemimpin politik dan lain-lain.

2.4.1 Teori Tentang Budaya Politik

Menurut Sudijono Sastroatmodjo (1995:35) menyatakan bahwa, “budaya politik seringkali tidak dipandang sebagai bagian dari kehidupan politik. Ia hanyalah dipandang sebagai kondisi-kondisi yang mewarnai corak kehidupan masyarakat

tanpa memiliki hubungan baik dengan sistem maupun dengan struktur politik “. Dengan pandangan itu budaya politik tidak diperhitungkan sama sekali dalam proses-proses politik. Asumsi itu banyak dipergunakan sebelum ada pendekatan – pendekatan yang mendasar diri pada budaya politik..

Almond dan Verba mengartikan kebudayaan politik suatu bangsa sebagai distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu, tidak lain adalah pola tingkah laku individu yang berkaitan dengan kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.

Setiap masyarakat dari suatu negara memiliki budaya politik demikian pula individu-individu yang hidup ditengah-tengah masyarakat yang senantiasa memiliki orientasi, persepsi terhadap sistem politiknya. Hal itu terjadi dalam masyarakat modern dan masyarakat tradisional, bahkan masyarakat primitif sekalipun.

Secara umum budaya politik diartikan sebagai pola tingkah laku individu (warga negara) dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem Politik. Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu. Menurut kedua ahli ilmu politik ini, warga negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga-lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki masing-masing. Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik. Luasnya bidang yang tercakup dalam studi

tentang budaya politik akan lebih terasa lagi bila konsep budaya politik itu diterapkan pada masyarakat Indonesia.

Kemajemukan dalam arti kultural yang dimiliki Indonesia, selain terdiri atas ribuan pulau sudah pasti membawa pengaruh yang sangat besar pada budaya politik bangsa ini. Terdapat banyak sarjana ilmu politik yang mengkaji tema budaya politik, sehingga terdapat variasi konsep budaya politik. Namun demikian derajat perbedaannya terlalu besar, sehingga tetap dalam koridor yang sama. Sedangkan konsep tentang budaya politik yang bisa dibandingkan, antara lain sebagai berikut:

Gabriel A. Almond dan Sidney Verba: budaya suatu bangsa adalah merupakan distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik di antara masyarakat bangsa itu. Alan R. Ball: Budaya politik adalah suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik. Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr.: Budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi.

Dua manfaat jika dapat memahami pengertian budaya politik adalah, adanya sikap warga negara terhadap sistem politik yang mempengaruhi tuntutan-tuntutan, tanggapan, dukungan serta orientasinya terhadap sistem politik yang ada dan dapat mengerti dan memahami hubungan antara budaya politik dengan sistem politik atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik.

Menurut Ranney, terdapat dua komponen utama dari budaya politik, yaitu Orientasi Kognitif (*cognitive orientations*) dan Orientasi Afektif (*affective orientations*). Sementara Almond dan Verba dengan lebih komprehensif mengacu pada apa yang dirumuskan Parsons dan Shils tentang klasifikasi tipe-tipe orientasi, yang mana orientasi itu mengacu pada aspek-aspek dan objek-objek yang dilakukan dalam sistem politik. Terdapat tiga orientasi, antara lain:

1. *Orientasi kognitif*, yaitu berupa pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya.
2. *Orientasi afektif*, yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan pe-nampilannya.
3. *Orientasi evaluatif*, yaitu keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Masih dalam kaitan dengan orientasi politik warga negara G. Almond dan S. Verba berpendapat, bahwa objek orientasi politik warga negara adalah sistem politik yang terbagi ke dalam tiga golongan objek, yaitu :

1. Peranan atau struktur khusus seperti badan legislatif, eksekutif atau birokrat.
2. Pemegang jabatan, seperti pemimpin monarki, legislator dan administrator.
3. Kebijakan, keputusan atau penguatan keputusan, struktur pemegang jabatan. Struktur secara timbal balik diklasifikasikan apakah mereka termasuk dalam proses input politik atau dalam proses administratif atau output.

Realitas yang ditemukan dalam budaya politik, ternyata memiliki beberapa variasi. Untuk penggolongan budaya politik secara khusus, ada yang berdasarkan

pada sikap yang ditunjukkan, berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan dan ada yang berdasarkan orientasi politiknya

Berdasarkan Sikap yang Ditunjukkan

1. Budaya Politik Militan

Budaya politik militan dimana perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang. Bila terjadi krisis, maka yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan disebabkan oleh peraturan yang salah, dan masalah yang mempribadi selalu sensitif dan membakar emosi. Dan menutup jalan bagi pertumbuhan kerja sama.

2. Budaya Politik Toleransi

Budaya politik dimana pemikiran berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar yang mana selalu membuka pintu untuk bekerja sama. Sikap netral atau kritis terhadap ide orang, tetapi bukan curiga terhadap orang.

Berdasarkan Sikap terhadap Tradisi dan Perubahan

1. Budaya Politik yang Memiliki Sikap Mental yang Absolut

Budaya politik yang mempunyai sikap mental yang absolut memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang dianggap selalu sempurna dan tak dapat diubah lagi. Budaya politik absolut tumbuh dari tradisi, jarang bersifat kritis terhadap tradisi, berusaha memelihara kemurnian tradisi. Maka, tradisi selalu dipertahankan dengan segala kebaikan dan keburukan. Kesetiaan yang absolut terhadap tradisi sehingga tidak memungkinkan pertumbuhan unsur

baru karena dianggap sebagai suatu tantangan yang berbahaya yang harus dikendalikan.

2. Budaya Politik Yang memiliki Sikap Mental Akomodatif

Struktur mental yang bersifat akomodatif biasanya terbuka dan sedia menerima apa saja yang dianggap berharga. Ia dapat melepaskan ikatan tradisi, kritis terhadap diri sendiri, dan bersedia menilai kembali tradisi berdasarkan perkembangan masa kini. Tipe akomodatif melihat perubahan sebagai salah satu masalah untuk dipikirkan dan mendorong usaha perbaikan dan pemecahan yang lebih sempurna.

Berdasarkan Orientasi politiknya

1. Budaya Politik Parokial

Budaya politik ini memiliki masyarakat yang kesadaran politiknya cukup rendah. Dan tidak menaruh minat terhadap kegiatan politik yang luas, hanya terbatas pada keterkaitan profesi. Budaya politik parokial yang murni terdapat pada masyarakat yang memiliki sistem tradisional yang sederhana dengan tingkat spesialisasi politik yang sangat minim. Contoh masyarakat yang memiliki budaya politik demikian adalah masyarakat suku-suku di Afrika atau komunitas-komunitas lokal yang otonom (kerajaan sentralistis) di Afrika atau di benua lain di dunia.

2. Budaya Politik Subjektif

Budaya subyektif artinya masyarakat sudah memiliki kesadaran terhadap sistem politik namun tidak berdaya dan tidak mampu berpartisipasi sehingga hanya

melihat outputnya saja tanpa bisa memberikan input. Contoh dari tipe orientasi ini adalah golongan bangsawan Perancis. Mereka sangat menyadari akan adanya institusi demokrasi, tetapi secara sederhana hal ini tidak memberi keabsahan pada mereka.

3. Budaya Politik Partisipan

Budaya politik partisipan adalah budaya politik di mana masyarakat memiliki kesadaran politik yang cukup tinggi. Selalu berpartisipasi dalam memberikan masukan, dan membuat tuntutan. Sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan warga negara.

Namun dalam kenyataannya tidak ada satupun negara yang memiliki budaya politik murni partisan, parokial atau subyek. Melainkan terdapat variasi campuran diantara ketiga tipe-tipe tersebut. Ketiganya menurut Almond dan Verba bervariasi ke dalam tiga bentuk budaya politik, yaitu:

1. Budaya politik subyek-parokial (*the parochial-subject culture*)
2. Budaya politik subyek-partisan (*the subject-participant*)
3. Budaya politik parokial-partisan (*the parochial-participant*)

Seorang ilmuwan politik Australia, Herbert Feith, mengemukakan bahwa Indonesia memiliki sejumlah budaya politik namun ada dua budaya politik yang dominan, yaitu “aristokrasi Jawa” dan “wiraswasta Islam”. Sementara seorang ahli antropologi dari Amerika Serikat, Clifford Geertz mengelompokkan masyarakat ini atas tiga subbudaya, yaitu santri, abangan, dan priyayi. Sementara ahli antropologi Amerika Serikat yang lain, Hildred Greetz, secara lebih menyeluruh

mengelompokkan masyarakat Indonesia ke dalam tiga subbudaya politik atau dalam terminologinya sendiri, *sociocultural types* (bentuk-bentuk sosio-kultural). Ketiga kelompok itu adalah “petani pedalaman Jawa dan Bali”, “masyarakat Islam pantai”, dan “masyarakat pegunungan”. Kendati demikian, tidaklah harus kita menerima begitu saja pendapat para ahli Barat di atas mengenai wajah budaya Indonesia. Cukuplah jelas kiranya bahwa karena bangsa kita berdasarkan prinsip Bhineka Tunggal Ika, semua bentuk subbudaya politik yang ada di tanah air ini adalah budaya politik Indonesia.

Dari Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat. Secara umum budaya politik diartikan sebagai pola tingkah laku individu (warga negara) dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem Politik

2.4.2 Teori tentang Sosialisasi politik

Sosialisasi Politik adalah suatu proses agar setiap individu atau kelompok dapat mengenali sistem politik dan menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap fenomena-fenomena politik. Sosialisasi politik berperan mengembangkan serta memperkuat sikap politik di kalangan warga masyarakat yang sadar politik, yaitu sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama. Peranan tersebut melibatkan keluarga, sekolah, dan lembaga-lembaga tertentu yang ada dalam masyarakat.

Salah satu sarjana yang secara khusus berkecimpung dalam ilmu politik, telah merumuskan konsep partisipasi politik yaitu Rush & Althoff, sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan dan reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan di mana individu berada; selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.

Masih menurut Rush dan Althof metode-metode dalam sosialisasi politik bisa berupa imitasi, intruksi, dan motivasi. Sosialisasi politik yang selanjutnya akan mempengaruhi pembentukan jati diri politik pada seseorang dapat terjadi melalui cara langsung dan tidak langsung. Proses sosialisasi politik tidak langsung bisa dilakukan dengan metode pengoperasian interpersonal, magang, dan generalisasi. Sedangkan proses sosialisasi langsung bisa terjadi melalui imitasi, sosialisasi politik antisipatoris, pendidikan politik, dan pengalaman politik.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa agar sosialisasi politik di Indonesia terealisasi maka perlu adanya sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik, serta mendorong timbulnya partisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya.

2.4.3 Teori Tentang Partisipasi Politik

Kegiatan partisipasi politik dilakukan oleh warga negara preman atau masyarakat biasa, sehingga seolah-olah menutup kemungkinan bagi tindakan-tindakan serupa yang dilakukan oleh non-warga negara biasa. Institusi yang menjadi sasaran atau

objek politik dalam partisipasi politik, yaitu pemerintah sebagai pemegang otoritas.

Adanya institusi-institusi politik di tingkat masyarakat, semisal partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media massa yang kritis dan aktif, merupakan satu indikator adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik. Dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa, aktivitas-aktivitas politik pemerintah dengan serta merta, secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh kelompok kepentingan, partai politik dan yang lainnya dalam infrastruktur politik, merupakan wujud dari keikutsertaan rakyat dalam proses politik dalam suatu sistem politik.

Beberapa sarjana yang secara khusus berkecimpung dalam ilmu politik, merumuskan beberapa konsep partisipasi politik, diantaranya: Ramlan Surbakti: Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Kevin R. Hardwick: Partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, menyampaikan kepentingannya thd pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut.

Miriam Budiardjo: Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan

jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Berdasarkan riset-riset tentang partisipasi politik yang dilakukan di beberapa negara, Huntington dan Nelson menemukan lima bentuk kegiatan utama yang dipraktikkan dalam partisipasi politik. bentuk-bentuk ini masing-masing memiliki tindakan dan pelaku yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu berkenaan dengan keikutsertaan warga negara untuk mempengaruhi proses-proses politik, diantaranya: Kegiatan Pemilihan, Lobbying, Kegiatan Organisasi, Mencari Koneksi (contacting), dan Tindakan Kekerasan (violence). Sedangkan di tingkat individu, secara lebih spesifik Milbrath M.L. Goel mengidentifikasi tujuh bentuk partisipasi politik individual:

- a. *Apathetic Inactives*,
- b. *Passive Supporters*,
- c. *Contact Specialist*,
- d. *Communicators*,
- e. *Party and campaign workers*,
- f. *Community activists*, dan
- g. *Protesters*.

Untuk menganalisis tingkat-tingkat partisipasi politik, Huntington dan Nelson mengajukan dua kriteria penjas. Pertama, dilihat dari ruang lingkup dari suatu kategori warga negara yang melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan politik. kedua, intensitasnya, atau ukuran, lamanya, dan arti penting dari kegiatan khusus itu bagi sistem politik.

Tingkatan partisipasi politik, mencerminkan kapasitas partisipan dalam berpartisipasi politik. Semakin tinggi tingkatan yang ditempati, maka semakin tinggi pula tingkatan partisipasi politiknya. Dalam lingkup partisipasi politiknya, jika semakin tinggi maka semakin sedikit (semakin mengerucut pada jumlah tertentu).

Voting merupakan tingkatan partisipasi politik terendah, yang membedakan satu tingkat di atas orang yang apatis total, sementara di atasnya terdapat orang atau sekelompok orang yang sering terlibat dalam diskusi-diskusi politik informal, yang proporsinya lebih rendah, namun intensitasnya lebih tinggi.

Dari penjelasan menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.

2.5 Tinjauan Tentang Kampanye

Menurut Hafied Cangara (2011:223),” kampanye adalah aktivitas komunikasi yang ditujukan untuk memengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap dan perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan penyebar atau pemberi informasi”. Dalam konteks komunikasi politik, kampanye dimaksudkan untuk memobilisasi dukungan terhadap suatu hal atau seorang kandidat.

Kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip pembelajaran bersama dan bertanggungjawab. Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh kampanye dan didukung oleh petugas kampanye serta diikuti oleh peserta kampanye. Pelaksana kampanye

terdiri atas Pengurus Partai Politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta juru kampanye dan satgas. Peserta kampanye adalah warga masyarakat pemilih, sedangkan yang dimaksud petugas kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye.

Pada hakikatnya kampanye dilaksanakan sebagai wujud pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Pemerintah melalui undang-undang nomor 8 tahun 2015 mencoba memformulasikan pelaksanaan kampanye agar lebih bermartabat dan menyentuh ranah kompetensi. Bentuk kegiatan kampanye yang dapat dilaksanakan oleh pasangan calon kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Pertemuan terbatas,
- b. Bertatap muka dan dialog,
- c. Debat publik / debat terbuka antar pasangan calon,
- d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum,
- e. Pemasangan alat peraga,
- f. Iklan media masa cetak dan media masa elektronik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut

Pelaksanaan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, penyiaran melalui radio dan/ atau televisi, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dapat dilaksanakan sejak tiga hari kerja setelah peserta Pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang. Sedangkan rapat umum, dilaksanakan selama 21 hari

kerja sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Ketentuan ini antara lain bertujuan untuk mengatasi masalah “mencuri *start*”.

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kampanye secara Nasional, baik mengenai waktu, tata cara dan tempat kampanye di pusat, diatur dengan peraturan KPU. Sedangkan ketentuan mengenai waktu dan pelaksanaan kampanye di tingkat provinsi diatur dengan keputusan KPU Provinsi dan mengenai waktu dan pelaksanaan kampanye di tingkat Kabupaten/ Kota, diatur dengan keputusan KPU Kabupaten/ Kota.

2.6 Tinjauan Tentang Pemilukada Serentak

2.6.1 Pengertian Pemilukada Serentak

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2015 di sebutkan bahwa “Pemilukada serentak (*concurrent elections*) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan”. Jenis-jenis pemilihan tersebut mencakup pemilihan eksekutif dan legislatif di beragam tingkat yang dikenal di negara yang bersangkutan, yang terentang dari tingkat nasional, regional hingga pemilihan di tingkat lokal. Pelaksanaan pemilukada yang akan dilaksanakan serentak pada desember 2015 nanti sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2015.

Pemilukada serentak 2015 akan dilaksanakan di 269 daerah pemilukada ini merupakan pemilukada serentak gelombang pertama menuju desain ideal pilkada, yakni serentak nasional untuk memilih DPR, DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta serentak daerah untuk memilih kepala daerah dan DPRD di tingkat

Provinsi, Kabupaten dan Kota. Setelah pilkada serentak 2015 di 269 daerah, maka dilanjutkan pilkada serentak gelombang kedua pada Februari 2017 di 99 daerah, gelombang ketiga pada Juni 2018 di 171 daerah. Kemudian akan dilaksanakan masing-masing satu gelombang lagi sampai menuju pilkada serentak (Pemilukada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah,

Disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan Negara ada pada rakyat. Melalui Pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara. Pemilukada menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang “Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Propinsi dan Kabupaten/ Kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 56 ayat (1) dinyatakan bahwa Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai Politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.

Secara normatif, berdasarkan ukuran-ukuran demokrasi, pemilukada langsung menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman dan perluasan demokrasi lokal. *Pertama*, sistem demokrasi langsung melalui pemilukada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi perwakilan yang lebih banyak meletakkan kuasa untuk menentukan rekrutmen politik di tangan segelintir orang di DPRD (oligarkis). *Kedua*, dari sisi kompetensi politik.

Pemilukada langsung memungkinkan munculnya secara lebih lebar preferensi kandidat-kandidat berkompetensi dalam ruang yang lebih terbuka dibandingkan ketertutupan yang sering terjadi dalam demokrasi perwakilan.

Pemilukada langsung bisa memberikan sejumlah harapan pada upaya pembalikan “*syndrome*” dalam demokrasi perwakilan yang ditandai dengan model kompetensi yang tidak *fair*, seperti; praktik politik uang (*money politics*). *Ketiga*, sistem pemilihan langsung akan memberi peluang bagi warga untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik seperti yang kasat mata muncul dalam sistem demokrasi perwakilan.

Melalui konsep demokrasi langsung, warga di aras lokal akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh semacam pendidikan politik, training kepemimpinan politik dan sekaligus mempunyai posisi yang setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik. *Keempat*, pemilukada langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan figur pemimpin yang aspiratif,

kompeten dan *legitimate*. Karena, melalui pemilukada langsung, kepala daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada warga dibandingkan pada segelintir elite di DPRD. Dengan demikian, Pemilukada mempunyai sejumlah manfaat, berkaitan dengan peningkatan kualitas tanggung jawab pemerintah daerah pada warganya yang pada akhirnya akan mendekatkan kepala daerah dengan masyarakat. *Kelima*, kepala daerah yang terpilih melalui pemilukada langsung akan memiliki legitimasi politik yang kuat sehingga akan terbangun perimbangan kekuatan (*check and balance*) di daerah antara kepala daerah dengan DPRD. Perimbangan kekuatan ini akan meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan seperti yang muncul dalam format politik yang monolitik. Suharizal, S.H., M.H, *Pemilukada Regulasi*, op. cit, hlm: 8-9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam pasal 56 sampai dengan pasal 119 berisi prosedur dan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka mempersiapkan pemilihan Kepala Daerah secara langsung antara lain:

- a. Mekanisme dan prosedur pemilihan. Mekanisme ini meliputi seluruh tahapan pemilihan mulai dari penjaringan bakal calon, pencalonan dan pemilihannya. Keterlibatan lembaga legislatif dan masyarakat dalam setiap tahapan tersebut diatur jelas dan tegas.
- b. Peranan DPRD dalam pemilihan Kepala Daerah. Dominasi peranan DPRD dalam Pemilukada seperti saat ini, tentu saja akan mengalami degradasi. Peranan DPRD tidak mengurangi fungsinya sebagai lembaga legislatif di daerah.

- c. Mekanisme pertanggung jawaban Kepala Daerah. Perubahan sistem pemilihan Kepala Daerah akan mempengaruhi mekanisme pertanggung jawaban kepala daerah.
- d. Hubungan Kepala Daerah dengan DPRD. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung akan berpotensi menimbulkan resistensi terhadap hubungan antara Kepala Daerah dan DPRD.
- e. Hubungan pelaksana pemilihan Kepala Daerah dengan pemilihan Presiden, anggota DPR, DPRD dan DPD. Dalam satu tahun, di suatu Kabupaten/ Kota, mungkin terjadi tiga kali pemilihan, yaitu Pemilu (presiden, DPR, DPRD), pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/ Walikota.

2.6.2 Efisiensi Pemilukada Serentak

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah harus berjala dengan, mandiri, jujur, adil,kepastian hukum juga mengedepankan efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian Tentunya penyelenggaraan pemilihan daerah harus dilaksanakan dengan seefisien mungkin. Seluruh anggaran negara yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan seyogyanya harus berdasarkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dengan mempergunakan anggaran yang sewajarnya. Jika kita mencermati penyelenggaraan pilkada langsung yang begitu mahal, maka penerapan asas efisiensi perlu mendapat perhatian khusus oleh seluruh pihak terlibat dalam proses pesta demokrasi pemilihan kepala daerah tersebut.

Beberapa hal yang didapat dilakukan untuk melakukan efisiensi penyelenggaraan Negara sehingga dapat mengurangi beban anggaran negara/ daerah dan mengurangi ongkos politik yang harus dikeluarkan oleh pasangan calon kepala daerah adalah hal-hal sebagai berikut antara lain :

1. Melaksanakan pilkada secara Serentak,
2. Membatasi atribut kampanye
3. Sanksi yang tegas terhadap politik uang,
4. Mengurangi kuantitas kampanye terbuka,
5. Pemberian bantuan atribut kampanye oleh penyelenggara,
6. Menyiapkan saksi di TPS oleh penyelenggara pemilihan.

2.7 Konsep Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

2.7.1 Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Prof. Dr. tukiran Taniredja, M.M., (2013:1), pendidikan Kewarganegaraan(PKn), “Merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antarwarga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara”.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa di setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat terdiri dari Pendidikan Bahasa, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Kep. Mendikbud No. 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa menetapkan bahwa “Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan

Kewarganegaraan termasuk dalam Mata Kuliah Umum (MKU) dan wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi”.

Penyempurnaan kurikulum tahun 2000, menurut Kep. Dirjen dikti No. 267/Dikti/2000 materi Pendidikan Kewiraan disamping membahas tentang PPBN juga dibahas tentang hubungan antara warga negara dengan negara. Sebutan Pendidikan Kewiraan diganti dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Materi pokok Pendidikan Kewarganegaraan adalah tentang hubungan warga negara dengan negara, dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN).

2.7.2 Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Berdasarkan Kep. Dirjen Dikti Depdiknas Pasal 3 No. 267/Dikti/2000 tentang penyempurnaan garis besar proses pembelajaran mata kuliah pengembangan kepribadian (MKPK) menyebutkan bahwa PKn di perguruan tinggi bertujuan untuk :

1. Dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dalam kehidupannya selaku warga negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab.
2. Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang hendak diatasi dengan penrapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, wawasan nusantara dan ketahanan nasional secara kritis dan bertanggung jawab.

3. Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan serta patriotisme yang cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

2.7.3 Visi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Menurut keputusan direktorat jenderal pendidikan tinggi departemen pendidikan nasional Republik Indonesia Nomor :43/DIKTI/Kep/2006 Tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) di perguruan tinggi, merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia indonesia seutuhnya.

2.7.4 Misi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Menurut Keputusan Direktorat jenderal pendidikan tinggi departemen pendidikan nasional republik Indonesia Nomor : 43/DIKTI/KEP/2006 Tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi, misi kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) di perguruan tinggi membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai,menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab.

2.7.5 Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Politik.

Pendidikan Kewarganegaraan diakui sebagai bidang yang multifacet PKn diartikan sebagai pendidikan politik yang yang fokus materinya peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. PKn sebagai program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat dan orang tua yang kesemua itu diproses guna melatih para siswa untuk berfikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasar Pancasila dan UUD 1945.

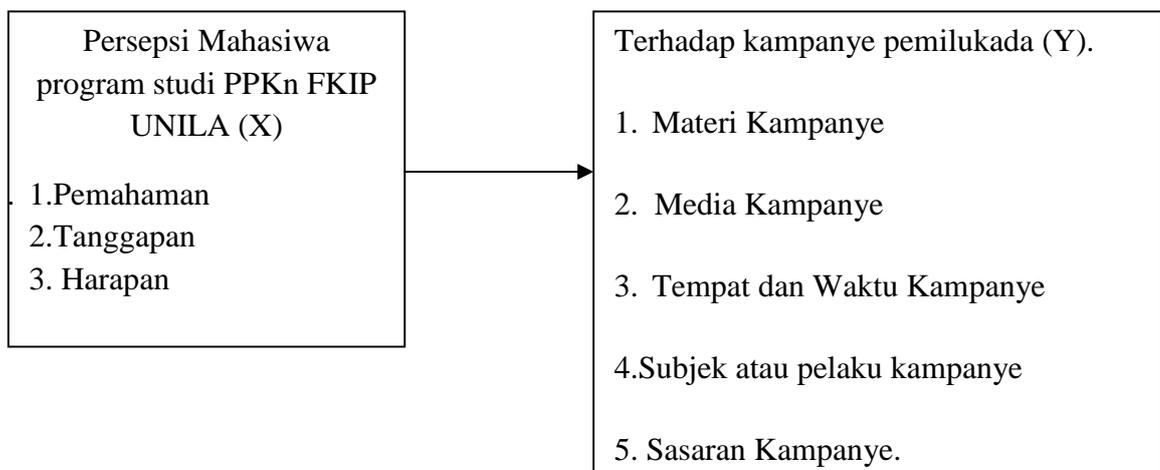
PKn didefinisikan sebagai suatu bidang kajian yang mempunyai objek telaah kebijakan dan budaya kewarganegaraan, menggunakan disiplin ilmu pendidikan dan ilmu politik sebagai kerangka kerja keilmuan pokok serta disiplin ilmu lain yang relevan, yang secara koheren diorganisasikan dalam bentuk program kurikuler kewarganegaraan, aktivitas sosial- kultural kewarganegaraan, dan kajian ilmiah kewarganegaraan Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan politik yang fokus materinya berupa peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (Prewitt & Dawson, dan Aziz dkk dalam Cholisin, 2004:10).

Pendidikan Kewarganegaraan lebih merupakan bentuk pengajaran politik atau pendidikan politik. Sebagai pendidikan politik berarti fokusnya lebih menekankan bagaimana membina warga negara yang lebih baik (memiliki kesadaran politik dan hukum) lewat suatu proses belajar mengajar (Cholisin, 2004:11). Dari penjelasan para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa, Pendidikan Kewarganegaraan adalah wahana untuk mengembangkan kemampuan, watak dan karakter warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

2.8 Kerangka Pikir

Dari setiap pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum kepala daerah yang diikuti oleh calon kepala daerah sebagai pesertanya. Seringkali didapati pelanggaran oleh tim sukses calon kepala daerah. Kampanye sebagai menawa ajang menawarkan program-program, visi-misi, tak jarang berubah menjadi ajang untuk memanjakan masyarakat dengan berbagai materi yang terkadang berkedok aksi sosial ataupun yang lainnya.

Sebagai gambaran pemikiran tanggapan mahasiswa adalah sebagai berikut :



III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian sangat dibutuhkan untuk mengukur keberhasilan dalam suatu penelitian. Menurut Maryaeni metode adalah cara yang ditempuh oleh peneliti dalam menemukan pemahaman sejalan dengan fokus dan tujuan yang ditetapkan. (maryaeni,2005:58). Dari pengertian tersebut maka dapat diartikan metode adalah : cara yang paling tepat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan dari penelitian yang dilakukan. Dilihat dari tujuannya penelitian ini. Maka metode yang yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif.

Menurut Moh. Nazir, metode deskriptif adalah suatu metode untuk meneliti status kelompok, status obyek status kondisi suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. (Moh. Nazir, 1988:63). Sedangkan menurut Muhammad Ali metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi pada situasi sekarang yang dilakukan dalam menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klarifikasi dan analisis pengolahan data membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dan suatu deskriptif. (Muhammad Ali, 1985:120). Beberapa pendapat di atas maka metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk meneliti suatu kelompok atau suatu obyek yang ditunjukkan pada pemecahan masalah

yang ada pada situasi sekarang, yang dilakukan dengan pengumpulan data, klasifikasi, analisis, pengolahan data dan pembuat kesimpulan yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada.

3.2 Populasi dan sampel

(Muh,Ali, 1987:54). Populasi adalah keseluruhan objek penelitian baik berupa manusia, benda, peristiwa maupun maupun berbagai gejala yang terjadi yang merupakan variabel yang ditentukan untuk memecahkan masalah dengan penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi PPKn FKIP Unila dari angkatan 2012 sampai mahasiswa angkatan 2015.

Tabel 3.1 Jumlah Mahasiswa PRODI PPKn

No	Mahasiswa PRODI PPKn	Jumlah
1	Angkatan 2012	85 Orang
2	Angkatan 2013	88 Orang
3	Angkatan 2014	77 Orang
4	Angkatan 2015	79 Orang
	Jumlah	329 Orang

Sumber: Data Mahasiswa pendidikan PPKn

Untuk penentuan jumlah sampel pada penelitian ini mengacu pada pendapat Arikuntoro (dalam Astria 2005:59) yang menyatakan bahwa apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika subjeknya lebih dari 100 orang maka penentuan jumlah sampel 10-15% atau 20-25% atau lebih.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka sampel yang akan diambil dalam penelitian adalah sebesar 10% dari jumlah populasi yaitu diambil 10% dari 329 orang mahasiswa yaitu sejumlah 33 orang mahasiswa.

3.3 Objek, Definisi dan Rencana Pengukuran Objek Penelitian

3.3.1 Objek penelitian

Menurut (Supranto 2000:21), Obyek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Kemudian dipertegas (Anto Dayan 986:21), Obyek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun obyek penelitian dalam penelitian ini meliputi :

- a. Persepsi Mahasiswa Terhadap Kampanye
- b. Materi kampanye
- c. Media Kampanye
- d. Tempat dan waktu kampanye
- e. Subjek kampanye
- f. Sasaran kampanye

3.3.2 Definisi Objek Penelitian

a) **Persepsi mahasiswa**

Persepsi mahasiswa adalah proses perlakuan mahasiswa terhadap informasi tentang suatu objek yang berlaku dalam lingkungan sosial khususnya dalam kegiatan kampanye dalam pilkada melalui pengamatan dengan indra yang dimiliki, sehingga mahasiswa dapat memberi arti serta menginterpretasikan objek yang diamati.

b) **Materi Kampanye**

isi dari kampanye yang memuat visi, misi dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi atau rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten / Kota.

c) **Media Kampanye**

Semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar peserta pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu

d) **Subjek atau Pelaku Kampanye**

Orang yang melakukan dan juga memfasilitasi kampanye. Pelaku kampanye PEMILUKADA terdiri atas pengurus partai politik, calon anggota DPR dan DPRD, juru kampanye pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu.

e) Tempat Dan Waktu Kampanye

Tempat dilaksanakan kampanye yaitu di kota Bandar Lampung dan waktu pelaksanaan kampanye pada tanggal 28 agustus-6 desember 2015.

f) Sasaran Kampanye

Sasaran kampanye merupakan hal yang hendak dicapai dalam kampanye, kemudian kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Pendidikan politik dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan.

3.3.3 Rencana pengukuran objek Penelitian

Yang diukur dalam variabel persepsi adalah besaran tingkat persepsi yang meliputi Tanggapan mahasiswa dan penafsiran mahasiswa prodi PPKn UNILA, untuk mengukur variable dalam penelitian ini dengan menggunakan alat ukur berupa angket yang berisikan besaran tingkat persepsi mahasiswa:

- a. baik
- b. kurang baik

3.4 Teknik Pengumpulan data

Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.4.1 Teknik Pokok**a. Angket**

Metode pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode angket yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara membuat sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden dengan maksud mendapatkan data dan

informasi langsung dari responden yang bersangkutan. Sasaran angket adalah mahasiswa program studi pendidikan PPKn FKIP Unila. Responden hanya memilih serta melihat jawaban yang telah disediakan sesuai dengan keadaan subjek. Jawaban dari pertanyaan - pertanyaan tersebut memiliki tiga alternatif jawaban yang masing - masing mempunyai skore atau bobot yang berbeda:

- a. Alternatif jawaban yang baik diberi skor 2
- b. Alternatif jawaban yang Kurang baik diberi skor 1

3.4.2 Teknik Pelengkap

a. Teknik wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi mengenai objek penelitian berdasarkan sumber seorang responden dengan cara bercakap-cakap secara berhadapan. Bentuk wawancara yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara Terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun pertanyaan dalam bentuk daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan.

3.5 Pelaksanaan Uji Coba Angket

3.5.1 Analisis Validitas Angket

Untuk mengetahui validitas angket, peneliti melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II. Setelah dinyatakan valid maka angket siap digunakan sebagai alat pengumpul data dan dilakukan uji reliabilitas.

3.5.2 Analisis Uji Reliabilitas

Suatu alat ukur / instrumen dalam penelitian dinyatakan baik apabila memiliki tingkat reliabilitas yang baik pula. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan uji coba angket kepada 10 orang diluar responden dengan teknik item ganjil dan item genap. Dalam pengolahan uji angket ini digunakan rumus *Product Moment* dandilanjutkan dengan rumus *Sperman Brown*.

Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan untuk menguji reliabilitas angket dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) mengadakan uji coba angket kepada 10 orang diluar responden.
- 2) dari hasil uji coba angket tersebut dikelompokkan kedalam item ganjil dan item genap, hal itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2 Distribusi Hasil Uji Coba Angket Persepsi Mahasiswa Program Studi Ppkn Universitas Lampung Terhadap Kampanye Pemilukada Serentak Di Provinsi Lampung Tahun 2015. Dari 10 orang diluar responden untuk kelompok item ganjil (X)

No	Item Ganjil (X)										Skor Total
	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	
1	2	1	2	1	2	2	1	2	1	2	16
2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	13
3	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	17
4	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	18
5	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	16
6	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	17
7	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	15
8	2	2	1	1	2	1	2	1	2	1	15
9	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2	16
10	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	17
Jumlah											160

Dari data tabel 4.1, diketahui $\sum X = 160$ yang merupakan hasil uji coba angket kepada 10 orang diluar responden dengan indikator item ganjil.

Tabel 3.3 Distribusi Hasil Uji Coba Angket Persepsi Mahasiswa Program Studi Ppkn Universitas Lampung Terhadap Kampanye Pemilukada Serentak Di Provinsi Lampung Tahun 2015. Dari 10 orang diluar responden untuk kelompok item genap (Y)

No	Item Genap (Y)										Skor Total
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	
1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	16
2	2	1	2	1	2	2	1	2	1	1	15
3	1	2	2	2	1	2	2	1	2	1	16
4	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	15
5	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	14
6	2	2	2	2	1	2	1	2	2	1	17
7	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	15
8	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	13
9	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	14
10	2	1	2	2	2	1	1	1	2	2	16
											151

Dari tabel 3.3 diketahui $\Sigma Y = 151$ yang merupakan hasil penjumlahan hasil skor uji coba angket kepada 10 orang diluar responden dengan indikator item genap. Hasil penjumlahan skor item ganjil dan item genap kemudian dimasukkan kedalam tabel distribusi hasil antara item ganjil (X) dan item genap (Y).

Tabel 3.4 Distribusi Hasil Antara item ganjil (X) dan item genap (Y)

No.Responden	X	Y	X ²	Y ²	XY
1	16	16	256	256	256
2	13	15	169	225	195
3	17	16	289	256	272
4	18	15	324	225	270
5	16	14	256	196	224
6	17	17	289	289	289
7	15	15	225	225	225
8	15	13	225	169	195
9	16	14	256	196	224
10	17	16	289	256	272
Jumlah	160	151	2578	2293	2422

Data tabel 4.3, merupakan hasil dari penggabungan hasil skor uji coba angket kepada 10 orang di luar responden dengan indikator item ganjil (X) dan item genap (Y). Hasil keseluruhan dari tabel kerja uji coba angket antara item ganjil (X) dengan item genap (Y) akan dikorelasikan menggunakan rumus *Product Moment* guna mengetahui besarnya koefisien korelasi instrumen penelitian.

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N \sum X^2 - (\sum X)^2][N \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

$$r_{xy} = \frac{10 \times 2422 - (160)(151)}{\sqrt{[10 \times 2578 - (160)^2][10 \times 2293 - (151)^2]}}$$

$$r_{xy} = \frac{24220 - 24160}{\sqrt{[25780 - 25600][22930 - 22801]}}$$

$$r_{xy} = \frac{60}{\sqrt{[180][129]}}$$

$$r_{xy} = \frac{60}{\sqrt{23220}}$$

$$r_{xy} = \frac{60}{152}$$

$$r_{xy} = 0,39$$

Berdasarkan data yang diperoleh di atas, maka untuk mengetahui koefisien seluruh item angket, digunakanlah rumus *Sperman Brown*, yaitu:

$$r_{11} = \frac{2x r_{1/21/1}}{(1 + r_{1/21/2})}$$

$$r_{11} = \frac{2x0,39}{(1 + 0,49)}$$

$$r_{11} = \frac{0,78}{1,39}$$

$$r_{11} = 0,56$$

Dari hasil penghitungan koefisien seluruh item angket di atas dengan hasil 0,56 dan jika dihubungkan dengan kriteria reliabilitas yang dikemukakan oleh Manasse Malo, yaitu:

0,90 – 1,00 = reliabilitas tinggi

0,50 – 0,89 = reliabilitas sedang

0,00 – 0,49 = reliabilitas rendah

Maka koefisien alat ukur tersebut dikategorikan ke dalam reliabilitas sedang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa angket tersebut dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan kata-kata dalam kalimat serta angka - angka secara terperinci, selanjutnya disimpulkan untuk mengelola dan menganalisis data digunakan rumus yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi, yaitu:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan :

I : Interval

NT : Nilai Tertinggi

NR : Nilai Terendah

K : Kategori

(Sutrisno Hadi, 1986 : 12)

Kemudian untuk mengetahui tingkat persentase digunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P : Besar persentase

F : Jumlah alternative jawaban seluruh item

N : Jumlah perkaitan antara item dengan responden

(Muh Ali, 1984:184)

Kriteria persentase sebagai berikut:

76-100% : Baik

56-75% : Cukup

40-55% : Sedang

3.7 Langkah – Langkah Penelitian

Langkah – langkah dalam penelitian pada hakekatnya merupakan suatu persiapan yang bersifat sistematis dengan tujuan agar penelitian dapat sskripsi ini peneliti melakukan kegiatan melalui langkah – langkah penelitian sebagai berikut:

3.7.1 Persiapan Penelitian

Tahap awal yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah peneliti mengajukan judul penelitian kepada dosen pembimbing akademik dan Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Lampung. Alternatif judul pertama yang kemudian disetujui pada tanggal 23 Oktober 2015 dan sekaligus ditentukan dosen pembimbing utama dan pembimbing pembantu.

3.7.2 Penelitian Pendahuluan

Setelah judul penelitian disetujui oleh pembimbing akademik dan Ketua Program Studi PPKn serta pembimbing utama dan Pembimbing Pembantu telah bersedia untuk membimbing dalam penyusunan skripsi, kemudian

peneliti mendapatkan izin penelitian pendahuluan dari Dekan FKIP Universitas Lampung pada 23 Desember 2015 dengan nomor 8815/UN26/3/PL/2015, maka penelitian ini dimulai dengan melakukan penelitian pendahuluan di Program Studi PPKn P. IPS Universitas Lampung

Adapun tujuan dari penelitian pendahuluan ini adalah untuk mengetahui lokasi dan keadaan tempat penelitian, memperoleh data pendukung penelitian serta mengetahui masalah yang akan diteliti.

3.8 Pengajuan Rencana Penelitian

Pengajuan rencana penelitian dilakukan setelah melaksanakan penelitian pendahuluan, kemudian peneliti membuat proposal penelitian untuk diseminarkan. Proposal penelitian ini disetujui oleh pembimbing II pada tanggal 17 Desember 2015 dan disetujui oleh pembimbing I pada tanggal 22 Desember 2015 serta telah disetujui oleh Ketua Program Studi PPKn Universitas Lampung. Langkah selanjutnya adalah mengurus berkas persyaratan untuk mendaftar seminar proposal, kemudian disepakati tanggal pelaksanaan seminar proposal yang dilaksanakan untuk mendapatkan masukan-masukan berupa saran dari dosen pembimbing dan pembahas guna kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini.

Setelah seminar proposal, kemudian peneliti melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan saran dan masukan dari dosen pembimbing dan pembahas dari hasil seminar proposal tersebut. Kemudian peneliti mendapatkan izin penelitian dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Lampung pada tanggal 18 April 2016 dengan nomor surat 1189/UN26/3/PL/2016. Selanjutnya surat diberikan kepada Ketua Program Studi PPKn Universitas Lampung. Dengan disetujuinya surat penelitian tersebut maka penelitian sudah dapat dilakukan.

3.9 Penyusunan Alat Pengumpulan Data

Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan teknik angket. Angket ini akan ditujukan kepada mahasiswa PRODI PPKn Universitas Lampung yang berjumlah 33 orang dengan jumlah pertanyaan 20 soal yang terdiri dari tiga (3) alternatif jawaban.

Langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam menyusun angket tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- 1) Membuat kisi-kisi angket tentang persepsi mahasiswa program studi PPKn Universitas Lampung terhadap kampanye pemilukada serentak di Provinsi Lampung tahun 2015.
- 2) Membuat item-item pertanyaan angket tentang persepsi mahasiswa program studi PPKn Universitas Lampung terhadap kampanye pemilukada serentak di Provinsi Lampung tahun 2015.
- 3) Melakukan konsultasi angket yang akan digunakan untuk penelitian kepada pembimbing I dan II guna mendapat persetujuan.
- 4) Setelah angket itu disetujui dan dinyatakan valid oleh pembimbing I dan pembimbing II, angket siap untuk diuji reliabilitasnya dengan cara disebarakan kepada sepuluh orang di luar responden dan

setelah uji coba tersebut maka angket akan diberikan kepada responden yang sebenarnya yang berjumlah 33 orang.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan tentang persepsi mahasiswa program studi PPKn Universitas Lampung terhadap kampanye pemilukada serentak di Provinsi Lampung tahun 2015, maka peneliti dapat menyimpulkan:

1. Kesimpulan Keseluruhan Kampanye PEMILUKADA serentak. masuk ke dalam kategori kurang baik, karena kampanye berjalan kurang tertib, serta kurang memberikan pendidikan politik kepada masyarakat serta sosialisasi kampanye berjalan kurang baik.
2. Persepsi mahasiswa terhadap indikator materi kampanye masuk ke dalam kategori kurang baik, karena Isi materi kampanye ada yang menjelek-jelekkan kandidat lain atau adanya *black campaign*.
3. Persepsi mahasiswa terhadap indikator media kampanye masuk ke dalam kategori kurang baik, karena pemasangan media kampanye yang tidak tertib, seperti pemasangan baleho yang tidak pada tempatnya dan terkesan tidak rapih dan tertib.
4. Persepsi mahasiswa terhadap indikator tempat dan waktu kampanye masuk ke dalam kategori kurang baik, karena pelaksanaan kampanye dilaksanakan diluar jadwal atau waktu yang telah ditentukan.

5. Persepsi mahasiswa terhadap indikator subjek kampanye masuk ke dalam kategori kurang baik, karena dalam pelaksanaan kampanye masih melibatkan anak kecil dan pejabat negara dalam proses kampanye.
6. Persepsi mahasiswa terhadap indikator sasaran kampanye masuk ke dalam kategori kurang tepat, karena banyak masyarakat yang kampanye berjalan kurang tertib, serta kurang memberikan pendidikan politik kepada masyarakat serta sosialisasi kampanye dengan kurang baik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti dapat mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pengawas Pemilu (PANWASLU) Provinsi Lampung untuk memilih anggota PANWASLU yang berkompeten dibidangnya, dan selalu ada ditempat kampanye, agar pelaksanaan kegiatan kampanye dapat berjalan aman, tertib dan sesuai dengan kepentingan masyarakat pada pemilihan umum yang akan datang.
2. Kepada calon kepala daerah dan tim sukses untuk mempertimbangkan supaya masyarakat lebih mengenal siapa calon kepala daerahnya dan mengetahui latar belakang calon kepala daerahnya dengan cara memperkenalkan diri keseluruh lapisan masyarakat baik secara langsung maupun brosur yang tidak mengandung unsur SARA. karena masyarakat banyak yang tidak mengenal dan mengetahui siapa calon kepala daerah yang berkampanye. Serta mengutamakan kepentingan masyarakat dari padanya mengobral janji yang tidak terpenuhi

dengan menghambur-hamburkan uang yang tidak berguna bagi kepentingan masyarakat

3. Kepada calon kepala daerah terpilih agar mempertimbangkan apa yang telah dijanjikan untuk kepentingan masyarakat agar memenuhi janjinya, sehingga masyarakat tidak kecewa dan semakin yakin dengan pilihannya.
4. Kepada masyarakat agar kedepannya dapat memilih calon kepala daerah yang baik dan berkompeten, serta tidak memilih calon kepala daerah dari materi yang diberikan selama kampanye.
5. Kepada Guru dalam memberikan materi pelajaran kebebasan mengungkapkan pendapat dan kemampuan menunjukkan budaya demokrasi dan menerapkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam masyarakat, yaitu dengan memberi pelajaran yang sesuai dengan situasi yang nyata yang terjadi dilingkungan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Alexis, Tan 1981. *Pengantar Teori Dan Manajemen Komunikasi*. Jakarta : Jurnal Press
- Ali, Mohammad. 1984. *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*. Jakarta : Angkasa
- Anonim.2015.*Berita Pilkada Bandar Lampung*.kpu-bandarlampungkota.go.id.diakses pada tanggal .16 November 2015
- Cangara, Hafied. 2011. *Komunikasi Politik*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Coser, Lewis. 1997. *Men Of Ideas*. New York : Paper Back
- Dajan, Anto. 1986. *Pengantar Metode Statistik II*. Jakarta : LP3ES
- Damanhuri, Didin.S. 1985. *Menerobos Krisis*. Jakarta : Inti Sari Aksara
- Danu dan Pius, Abdilah. 2008. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya : Arkola
- Darmawan, Alvian, 1995. *Mahasiswa dan Masa Depan Partai Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Erwin, Muhammad. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Hayatun. 1996. *Pergerakan Mahasiswa*. Jakarta : Kurnia Jakarta
- Hollyzon, Rahmat.Sundari, Sri. 2015.*PILKADA*. Jakarta : Bestari
- Labola, Muhamadam.2011.*Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*.Jakarta
- Mannase Mallo . 1985. *Pengantar metodologi Sosial*. Kurnia Jakarta.
- Marijan , Kacung. 2006. *Demokratisasi Di Daerah*. PustakaEureka. Surabaya.
- Maryaeni. 2005. *Metode Penelitian*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Mar'at. 1991. *Sikap Manusia, perubahan srta pengukuran*. Ghalia. Jakarta.

- Moh. Nazir, 1998. *Metodologi Penelitian*. Ghalia, Indonesia, Jakarta.
- Nawawi, Hadari. 1996. *Penelitian Terapan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Paisley J, William. 1981. *Public Communication Campaigns*. Blevly Hill : CA Sage .
- Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2015 tentang dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dn wakil walikota.
- Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah
- Prahadiansyah, Adnan.1999. *Pergerakan Mahasiswa*. Jakarta : Gramedia
- Purwadarmintha Muksin, Uhar.2007. Persepsi Siswa Terhadap Materi Evolusi di SMA. *Skripsi*. Gorontalo : Universitas Gorontalo
- Rahmawati. 2006. *Mahasiswa Dan Demokrasi*. Bandung : Pustaka Setia
- Rahmat jalaludin,1999. *Psikologi Sosial*. Rineka Cipta, jakarta.
- Robbins, dkk. 2003. *Perilaku Organisasi*. Jakarta. Penerbit : Gramedia
- Slamet, R. Marrgono.2011. *Mahasiswa Dalam Pembangunan : Materi Pembekalan KKN*. Bandar Lampung
- Slameto. 2003. *Belajar Dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Jakarta : Rineka Cipta
- Sobur, Alex. 2003. *Psikologi Umum*. Pustaka Setia: Bandung.
- Solso, dkk. 2007. *Psikologi Kognitif*. Jakarta. Penerbit : Erlangga
- Stenberg, Arnold. 2006. *Kampanye Politik Dalam Praktek*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Subakdi. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan sekolah menengah pertama kelas VIII jilid 2*. Depdiknas. Jakarta
- Supranto.2000. *Statistik (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta : Erlangga
- Sutrisno Hadi, 1986. *Op Cit* .
- Taniredja, Tukiran.2013.*Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta.Ombak

Unila. 2007. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Bandar Lampung: Unila.

Wahidin,Samsul.2008.*Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*.Yogyakarta.
Pustaka Pelajar

Walgito, Bimo. 2004. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta : Andi